

**DAMPAK KEBIJAKAN EKONOMI SULTAN MAHMUD BADARUDDIN I
TERHADAP KEMAJUAN PEMBANGUNAN KESULTANAN PALEMBANG
(1136-1171 H / 1724-1757 M)**



SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan
guna memperoleh gelar Sarjana Humaniora (S. Hum)
dalam Ilmu Sejarah Peradaban Islam

Oleh:

Leni Mastuti
NIM. 1524200017

**PROGRAM STUDI SEJARAH PERADABAN ISLAM
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
PALEMBANG
2019**

NOMOR:B.1412/Un.09/IV.1/PP.01 /06 /2019

SKRIPSI

**DAMPAK KEBIJAKAN EKONOMI SULTAN MAHMUD BADARUDDIN I
TERHADAP KEMAJUAN PEMBANGUNAN KESULTANAN PALEMBANG
(1136-1171 H / 1724-1757 M)**

Yang telah disusun dan dipersiapkan oleh

LENI MASTUTI
NIM. 1524200017

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada tanggal 13 Juni 2019

Susunan Dewan Pembimbing dan Penguji

Ketua Dewan Penguji

Sekretaris

Dr. M. Syawaludin, M. Ag
NIP. 197111242003121001

M. Sirajuddin Fikri, M.Hum
NIDN.0229017901

Pembimbing I

Penguji I

Drs. Masyhur, M.Ag., Ph. D
NIP. 196712119994031002

Dr. M. Syawaludin, M. Ag
NIP. 197111242003121001

Pembimbing II

Penguji II

Nurfitri Hadi, MA
NIDN. 2007068602

Dra. Hj. Sri Suriana, M.Hum
NIP. 195909021986032003

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
untuk memperoleh gelar Sarjana Humaniora (S. Hum)
Tanggal, 14 Juni 2019

Dekan
Fakultas Adab dan Humaniora
KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS PADJARAN
PALEMBANG
Dr. Huda Ali, M.Ag., MA
NIP. 19701114 200003 1 002

Ketua Program Studi
Sejarah Peradaban Islam
Padila, S.S., M.Hum
NIP. 197607232007101003

NOTA DINAS

Perihal : Skripsi Saudari
Leni Mastuti

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Adab dan Humaniora
UIN Raden Fatah Palembang
di-
tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap naskah skripsi yang berjudul:

“Dampak Kebijakan Ekonomi Sultan Mahmud Badaruddin I Terhadap Kemajuan Pembangunan Kesultanan Palembang (1136-1171 H / 1724-1757 M)”
Yang ditulis oleh:

Nama : Leni Mastuti

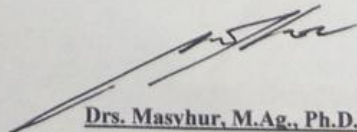
NIM : 1524200017

Prodi : Sejarah Peradaban Islam

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan ke Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang untuk diajukan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Humaniora Prodi Sejarah Peradaban Islam.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Palembang, Juli 2019
Pembimbing I



Drs. Masyhur, M.Ag., Ph.D.

NIP. 196712111994031002

NOTA DINAS

Perihal : Skripsi Saudari
Leni Mastuti

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Adab dan Humaniora
UIN Raden Fatah Palembang
di-
tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap naskah skripsi yang berjudul:

**“Dampak Kebijakan Ekonomi Sultan Mahmud Badaruddin I Terhadap
Kemajuan Pembangunan Kesultanan Palembang (1136-1171 H / 1724-1757 M)”**
Yang ditulis oleh:

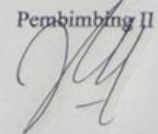
Nama : Leni Mastuti
NIM : 1524200017
Prodi : Sejarah Peradaban Islam

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan ke Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang untuk diajukan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Humaniora Prodi Sejarah Peradaban Islam.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Palembang, Juli 2019

Pembimbing II



Nurfitri Hadi, M. A

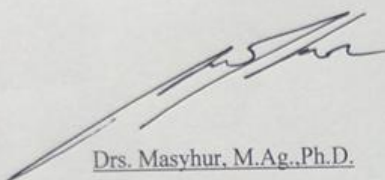
NIDN. 2007068602

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang disusun oleh Leni Mastuti, NIM 1524200017
Telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan

Palembang, Mei 2019

Pembimbing I



Drs. Masyhur, M.Ag., Ph.D.

NIP. 196712111994031002

Palembang, Mei 2019

Pembimbing II



Nurfitri Hadi, M.A

NIDT. 2007068602

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu lembaga perguruan tinggi, dan sejauh pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebut dalam daftar pustaka.

Palembang, Mei 2019

Yang menyatakan,



Leni Mastuti
1524200017

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Allah la engkau berharap.(Q.S.Al-Insyirah,6-8)

Memulai dengan penuh keyakinan.

Menjalankan dengan penuh keikhlasan.

Menyelesaikan dengan penuh kebahagiaan

Puji Syukur kepada Allah Yang Maha Esa atas nikmat yang telah Engkau berikan selama ini. Karya ini ku persembahkan kepada:

- ❖ Ayahanda Ahmad Syukri dan Ibunda Nuraini yang selalu mencurahkan kasih sayang dan doa yang tak pernah henti mengiringi perjalanan hidupku.
- ❖ Saudara-saudara ku yang tersayang, Yanti, Linda Wati, Ahmad Yani yang selalu mendukung dan mendo'akan setiap perjuanganku.
- ❖ Semua guruku, sejak aku memasuki pendidikan Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi yang telah mengajariku dan memberiku banyak ilmu.
- ❖ Keluarga besar yang telah banyak membantu dan mendoakanku.
- ❖ Sahabat-sahabat seperjuanganku tersayang yang telah membantu dan memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
- ❖ Almamater tersayang, UIN Raden Fatah Palembang

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmaanirrohiim

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah rabbil'alamiin segala puji bagi Allah Tuhan seru sekalian alam, yang karena rahmat, taufiq dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam tidak lupa saya haturkan kepada kekasih Allah, suri tauladan yakni Nabi Muhammad SAW.

Adapun skripsi yang berjudul **“Dampak Kebijakan Ekonomi Sultan Mahmud Badaruddin I Terhadap Kemajuan Pembangunan Kesultanan Palembang (1136-1171 H / 1724-1757 M)”**, merupakan upaya penulis untuk melihat dan memahami dampak ekonomi dalam kemajuan Kesultanan Palembang Masa SMB I. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca.

Sungguh suatu perjalanan yang panjang bagi penulis dalam memenuhi tugas yang harus diselesaikan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Humaniora pada Fakultas Adab dan Humaniora Jurusan Sejarah Peradaban Islam. Penyusunan skripsi ini dapat terwujud atas bimbingan, bantuan serta doa berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis banyak mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ayahanda Ahmad Syukri dan Ibunda Nuraini yang begitu besar pengorbanannya untuk penulis, memberikan semangat dan doa yang tak pernah henti selama ini.

2. Bapak Prof. Dr. H. M. Sirozi, MA, Ph.D. selaku Rektor UIN Raden Fatah Palembang beserta staf.
3. Bapak Dr. Nor Huda, M.Ag, M.A, selaku Dekan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Fatah Palembang beserta staf yang telah memberikan kelancaran dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Drs. Masyhur, M.Ag.,Ph.D. selaku pembimbing I yang telah banyak memberikan ilmu, saran, waktu, dan pengarahan hingga terselesainya skripsi ini. Serta bapak Nurfitri Hadi selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan ilmu, waktu dan pikiran yang membantu terselesainya skripsi ini.
5. Ketua jurusan Sejarah Peradaban Islam, Bapak Padila, M.Hum dan Sekretaris yang telah banyak memeberikan motivasi kepada penulis.
6. Para Dosen dan Guru Besar Fakultas Adab dan Humaniora yang telah banyak memberikan ilmunya.
7. Pembimbing komunitas Pecinta Sejarah, bapak Kemas A.R. Panji, M. Si serta keluarga besar Komunitas Pecinta Sejarah UIN Raden Fatah Palembang yang telah banyak memberikan ilmu dan dukungannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Sahabat-sahabat Jurusan Sejarah Peradaban Islam angkatan 2015, selaku teman-teman seperjuangan dalam menyelesaikan studi ini. Kalian yang menemani, mendukung dan memberikan motivasi untuk memperoleh gelar S.Hum. bersama.
9. Semua pihak yang telah banyak membantu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Atas bantuan serta dukungan dari berbagai pihak penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Semoga Allah SWT memberikan limpahan anugerah dan rahmat pada kita semua. Penulis berharap, semoga skripsi ini menjadi karya tulis yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta bagi kita semua.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, Mei 2019

Penulis,

Leni Mastuti
1524200017

INTISARI

*Jurusan Sejarah Peradaban Islam
Program Strata I Fakultas Adab dan Humaniora
UIN Raden Fatah Palembang
Skripsi, 2019*

Leni Mastuti, Dampak Kebijakan Ekonomi Sultan Mahmud Badaruddin I Terhadap Kemajuan Pembangunan Kesultanan Palembang (1136-1171 H / 1724-1757 M)

i + 70 hlm + lampiran

Skripsi ini berjudul “Dampak Kebijakan Ekonomi Sultan Mahmud Badaruddin I Terhadap Kemajuan Pembangunan Kesultanan Palembang (1137-1171 H / 1724-1757 M)”. Skripsi ini memiliki dua permasalahan, yaitu bagaimana kebijakan ekonomi pada masa pemerintahan Sultan Mahmud Badaruddin I dan apakah kebijakan Sultan Mahmud Badaruddin I berdampak pada kemajuan pembangunan Kesultanan Palembang. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan ekonomi pada masa pemerintahan Sultan Mahmud Badaruddin I dan untuk mengetahui dampak kebijakan Sultan Mahmud Badaruddin I pada kemajuan pembangunan Kesultanan Palembang.

Jenis penelitian ini adalah studi pustaka. Penelitian ini menggunakan metode sejarah dengan menggunakan pendekatan sejarah ekonomi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Kebijakan James E. Anderson untuk menganalisis dampak-dampak dari kebijakan ekonomi Sultan Mahmud Badaruddin I. Sumber-sumber yang digunakan dalam penelitian ini berupa naskah *Contract Palembang 10 September 1755*, dan buku-buku serta jurnal yang terkait dengan penelitian.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah kondisi perekonomian pada masa SMB I berjalan dengan baik. Bentuk-bentuk kebijakan SMB I dalam perdagangan, pertanian, pertambangan, kontrak dagang dengan VOC, pencetakan mata uang, membayar pajak, upeti, dan bea cukai telah memberikan keuntungan bagi perekonomian Kesultanan Palembang. Adanya kebijakan ekonomi yang menguntungkan bagi Kesultanan Palembang berdampak terhadap kemajuan pembangunan di Palembang. Pada masa ini dibangun Makam Kawah Tekurep tahun 1728 M, Keraton Kuto Batu tahun 1737 M, Masjid Sultan Mahmud Badaruddin Jayo Wikramo (Masjid Agung) tahun 1738 M.

Kata kunci: Sultan Mahmud Badaruddin I, Kebijakan, Pembangunan

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan.....	ii
Nota Dinas Pembimbing I	iii
Nota Dinas Pembimbing II.....	iv
Persetujuan Pembimbing	v
Pernyataan Keaslian	vi
Motto dan Persembahan	vii
Kata Pengantar	viii
Intisari	xi
Daftar Isi	xii
 BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Tinjauan Pustaka	8
E. Kerangka Teori	10
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan	19
 BAB II: MASA KEPEMIMPINAN SULTAN MAHMUD BADARUDDIN I	
A. Biografi Sultan Mahmud Badaruddin I	20
B. Silsilah Kesultanan Palembang	22
C. Pengangkatan Menjadi Sultan	23
 BAB III: KONDISI EKONOMI SEBELUM DAN SESUDAH MASA SULTAN MAHMUD BADARUDDIN I (1136-1171 H / 1724-1758 M)	
A. Kehidupan Masyarakat Palembang	25
1. Kondisi Sosial	26

2. Kondisi Ekonomi	28
3. Kondisi Politik	31
B. Kondisi Ekonomi Sebelum Masa SMB I	34
C. Kondisi Ekonomi Pada Masa SMB I	36
1. Perdagangan	37
2. Pertanian	40
3. Pertambangan Timah	42
BAB IV: DAMPAK KEBIJAKAN EKONOMI SULTAN MAHMUD BADARUDDIN I TERHADAP KEMAJUAN PEMBANGUNAN KESULTANAN PALEMBANG	
A. Kebijakan Ekonomi Sultan Mahmud Badaruddin I	47
B. Bentuk-bentuk Kebijakan Ekonomi SMB I	48
1. Kebijakan Perdagangan	48
2. Kontrak Dagang dengan VOC	49
3. Kebijakan Pertanian	51
4. Kebijakan Pertambangan	54
5. Mata Uang	57
6. Kebijakan Membayar Pajak, Upeti, dan Bea Cukai	60
C. Dampak Kebijakan Ekonomi SMB I dalam Kemajuan Pembangunan Kesultanan Palembang	62
1. Pembangunan Kota Palembang	63
a. Kawah Tengchurep	64
b. Keraton Kuto Batu	65
c. Masjid Sultan Mahmud Badaruddin Jayo Wikramo	66
BAB V: PENUTUP	
A. Simpulan	69
B. Saran	70

Daftar Pustaka

Lampiran

Lampiran 1: ANRI: Katalog Palembang. No. 41.8 Contract Palembang 10

September 1755.

Lampiran 2: Contract Palembang 10 September 1755. Perkara yang kedua

Lampiran 3: Contract Palembang 10 September 1755. Perkara yang kedelapan

Lampiran 4: Contract Palembang 10 September 1755. Perkara yang kesembilan dan perkara yang kesepuluh

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sumatera Selatan sejak dahulu menduduki tempat yang strategis, dimana dahulu pernah berjaya kerajaan Sriwijaya yang bernuansa agama Budha, kemudian dilanjutkan masa Kesultanan Palembang yang bernuansa agama Islam. Menurut buku *Budaya Bahasa Basemah*, Palembang berasal dari kata *belimbang*, yang artinya tempat yang sangat ramai dan bukan tempat orang mencari emas atau tempat mendulang emas. Syahdan menurut riwayat, aliran sungai negeri Melayu semakin lama semakin ramai dan menjadi bandar besar dan pusat perdagangan antar pulau bahkan sampai ke manca negara. Begitu ramainya orang-orang yang hilir mudik, lalu lalang disebutlah menjadi *Pelimbangan Manusia* yang asal katanya *Belimbang* dan sampai sekarang disebutlah Palembang.¹

Kota Palembang didirikan pada tanggal 17 bulan Juni tahun 683 M. Penanggalan ini berdasarkan tulisan dan perhitungan dari penanggalan tahun Caka, yang terdapat pada prasasti Kedukan Bukit yang ditemukan di Bukit Kampung 35 Ilir Kecamatan Ilir Barat II sekarang. Tanggal tersebut ditetapkan sebagai hari lahir Kotamadya Palembang dengan SK Walikota Kepala Daerah Tingkat II Kotamadya Palembang tanggal 6 Mei 1972 No. 57/Um/Wk/72.²

¹Temenggung Citra Mirwan, *Besemah Keluarga Besar Rumpun Melayu*, (Pagaralam: Yayasan Dempo Lestari, 2015), hlm. 29-30.

²Ali Amin, "Sejarah Kesultanan Palembang Darussalam dan Beberapa Aspek Hukumnya", dalam K.H.O. Gadjahnata dan Sri Edi Swasono (ed.), *Masuk dan Berkembangnya Islam di Sumatera Selatan*, (Jakarta: UI-Press, 1986), hlm. 68.

Menurut Woulders dalam buku Endang Rochmiatun (2014) mengatakan, wilayah negeri Palembang meliputi segala huluan Batanghari Sembilan dan negeri-negeri di luar Palembang, seperti pulau Bangka dan Belitung. Daerah Batanghari Sembilan adalah daerah sembilan sungai utama yang hampir semuanya bermuara di Sungai Musi, kecuali Sungai Banyuasin.³ Sungai-sungai tersebut merupakan jalur dari pusat kota menuju ke daerah-daerah pedalaman yang kaya berbagai hasil perkebunan yang nantinya akan dijual ke pusat kota.

Pertumbuhan dan perkembangan kota-kota pusat kerajaan disebabkan oleh beberapa faktor, yakni geografis, ekonomi, politik, kosmologi, dan magis religius. Lokasi-lokasi pusat kerajaan di pesisir dan di muara sungai-sungai erat hubungannya dengan geografis yang penting terutama untuk hubungan lalu lintas.⁴ Oleh karena itu, pertumbuhan kota-kota yang bercorak Islam ada hubungannya dengan faktor ekonomi dalam kemajuan di bidang pelayaran dan perdagangan pada masa itu.

Palembang yang terletak di kedua sisi Sungai Musi, dilewati oleh dua puluh sampai tiga puluh anak sungai, terutama di aliran kiri yang bermuara ke Sungai Musi. Itulah sebabnya Palembang disebut juga “Kota Dua Puluh Pulau”. Sungai Musi pada waktu itu dimanfaatkan untuk perdagangan. Kapal-kapal dagang tidak hanya berlayar sampai ibu kota tetapi terus masuk jauh ke *Uluan* (pedalaman).⁵ Pada masa itu, Sungai Musi mempunyai peranan yang sangat penting bagi masyarakat Palembang,

³ Endang Rochmiatun, *Ulama dan Perkembangan Lektur Islam di Palembang*, (Palembang: Nor Fikri, 2014), hlm. 48.

⁴ Nor Huda, *Sejarah Sosial Intelektual Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 20.

⁵ Farida R. Wargadalem, *Kesultanan Palembang dalam Pusaran Konflik (1804-1825)*, (Jakarta: Gramedia, 2017), hlm. 2-3.

segala aktivitas masyarakat dilakukan melalui Sungai Musi. Sebelum era modern, jalur laut merupakan jalur yang paling penting dan strategis dalam kemajuan pelayaran dan perdagangan pada masa itu.

Keadaan Sungai Musi yang membelah kota Palembang menjadikan karakteristik lingkungan fisik daerah Palembang menjadi berbeda dan digunakan oleh penduduk setempat untuk membedakan kawasan dataran rendah dengan daerah *Iliran*, yang terletak di sebelah utara Sungai Musi dan kawasan dataran tinggi di sebelah selatan Sungai Musi disebut dengan istilah daerah *Uluan*.⁶ Sebagai sebuah tempat yang bergantung pada sungai, maka transportasi air yang hilir mudik di perairan Sungai Musi menggunakan kapal dan perahu. Pada masa itu transportasi kapal dan perahu memegang peranan yang penting dalam kemajuan ekonomi.

Pada akhir abad ke-16 M terjadi perubahan dalam sejarah Palembang, dengan berdirinya kerajaan bernuansa Islam dibawah pimpinan Ki Gede Ing Suro, tepatnya tahun 1573 M. Ki Gede Ing Suro sebenarnya *Juluk* semacam gelar atau panggilan kehormatan.⁷ Ki Gede Ing Suro merupakan pendiri dari kerajaan Palembang, yang awal mulanya mendirikan Keraton Kuto Gawang sebagai pusat pemerintahannya.

Pada pertengahan abad XVII berdiri Kesultanan Palembang, tepatnya di bawah kepemimpinan Sultan Abdul Rahman Khalifatul Mukminin Sayyidul Imam (1070-1114 H / 1659-1702 M). Sebelumnya, Palembang berbentuk kerajaan yang

⁶ Retno Purwanti, "Mata Pencarian Masyarakat Palembang pada Abad XIX-XX di Daerah Hilir", dalam *Peradaban Masa Lalu Sumatera Selatan*, (Palembang: Balai Arkeologi Sumatera Selatan, 2016), hlm. 66.

⁷ Salman Ali, "Sejarah Kesultanan Palembang", dalam buku K.H.O. Gadjahnata dan Sri Edi Swasono, (ed.), *Masuk dan Berkembangnya Islam di Sumatera Selatan*, hlm. 126.

berada di bawah pengaruh Kerajaan Mataram. Perubahan bentuk pemerintahan ini, menandai pula lepasnya Palembang dari Mataram. Sebagai kerajaan yang berdaulat penuh, maka Kesultanan Palembang makin berkembang perekonomiannya.⁸ Jika melihat kondisi Kesultanan Palembang Darussalam yang strategis, ternyata Palembang pada masa itu banyak menghasilkan komoditi, seperti hasil perkebunan dan hasil bumi yang sangat dibutuhkan oleh pasaran, baik dalam negeri maupun luar negeri. Karena Palembang memiliki kekayaan alam yang melimpah serta pemerintah yang dapat mengelolah sumberdaya alam dengan baik, inilah yang membuat Kesultanan Palembang menjadi penting dalam hubungan perdagangan.

Pelabuhan Palembang banyak dikunjungi oleh kapal-kapal niaga terutama dari Jawa, Madura, dan Sulawesi. Kapal-kapal ini membawa beras, garam, dan bahan pakaian dan membawa pulang lada dan timah dari Palembang.⁹ Tidak hanya datang dari berbagai daerah saja di Nusantara, tetapi pelabuhan di Palembang menjadi salah satu tempat perdagangan internasional yang banyak dikunjungi oleh negara-negara luar, seperti Cina, Arab dan Eropa.

Meningkatnya perdagangan internasional pada masa Kesultanan Palembang juga ikut mempengaruhi perkembangan ekonomi di wilayah Palembang dan sekitarnya. Karena selain letaknya yang dekat dengan lalu lintas perdagangan, wilayah ini juga memiliki produksi penting yang dibutuhkan dalam pasar perdagangan internasional, yaitu hasil bumi dan rempah-rempah.

⁸ Farida, *Perekonomian Kesultanan Palembang*, dalam : Journal.unj.ac.id. diakses pada: 3 Mei 2018.

⁹ Nor Huda, *Sejarah Sosial Intelektual Islam di Indonesia*, hlm. 22.

Sumber penghasilan Kesultanan yang lebih besar sesungguhnya berasal dari kegiatan perdagangan. Bahkan dapat dikatakan bahwa sektor perdagangan merupakan sektor terpenting pada masa Kesultanan Palembang.¹⁰ Perdagangan Kesultanan Palembang tidak hanya di dalam negeri, melainkan juga sampai ke pasar ekspor. Bidang perdagangan menjadi sumber kemakmuran dan kemajuan bagi Kesultanan dan masyarakat Palembang.

Pada masa Sultan Mahmud Badaruddin I (Jayo Wikramo, 1136-1171 H / 1724-1757 M) Kota Palembang mengalami kemajuan dan juga modernisasi. Banyak bangunan didirikan, salah satunya Masjid Sultan Mahmud Badaruddin Jayo Wikramo (Masjid Agung) dan Makam Kawah Tekurep, Keraton Kuto Batu. Kemakmuran dan kejayaan Kesultanan Palembang yang diperoleh dari hasil perdagangan, hasil bumi, dan timah. Keadaan ekonomi yang baik, berdampak pada perkembangan pembangunan pada masa itu.

Kondisi perekonomian yang cukup baik di bidang perdagangan yang memberikan kontribusi penting dalam kemajuan perekonomian Kesultanan Palembang serta kebijakan ekonomi yang menguntungkan bagi Kesultanan Palembang yang berdampak terhadap kemajuan pembangunan di Palembang. Bagaimana sesungguhnya kebijakan ekonomi yang dijalankan oleh SMB I sehingga berdampak terhadap kemajuan di Palembang. Inilah yang membuat peneliti tertarik untuk meneliti tentang “Dampak Kebijakan Ekonomi Sultan Mahmud Badaruddin I

¹⁰ Nawiyanto dan Eko Crys Endrayadi, *Kesultanan Palembang Darussalam : Sejarah dan Warisan Budayanya*, (Jember: Jember Universiti Press, 2016), hlm. 77-78

Terhadap Kemajuan Pembangunan Kesultanan Palembang (1136-1171 H / 1724-1757 M)”.
1757 M)”.
1757 M)”.

B. Rumusan dan Batasan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti merumuskan beberapa masalah yang perlu diangkat dan diteliti, sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan ekonomi pada masa pemerintahan Sultan Mahmud Badaruddin I ?
2. Apakah kebijakan Sultan Mahmud Badaruddin I berdampak pada kemajuan pembangunan Kesultanan Palembang?

Agar penelitian ini tidak menyimpang dari pembahasan, maka perlunya dibuat batasan masalah. Pembatasan masalah dalam penelitian sangatlah penting agar pembahasan ini lebih terarah pada topik yang dibahas terutama dalam pengumpulan sumber dan pembahasan permasalahan. Berdasarkan rumusan masalah di atas, penulis membatasi penelitian mulai dari sejarah kebijakan dan perkembangan ekonomi masa Sultan Mahmud Badaruddin I serta dampak ekonomi terhadap pembangunan Kesultanan Palembang.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian yang berjudul “Dampak Kebijakan Ekonomi Sultan Mahmud Badaruddin I Terhadap Kemajuan Pembangunan Kesultanan Palembang (1136-1171 H /1724-1757 M)”, memiliki tujuan dan kegunaan penelitian sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

- a. Untuk mengetahui kebijakan ekonomi pada masa pemerintahan Sultan Mahmud Badaruddin I.
- b. Untuk mengetahui dampak kebijakan Sultan Mahmud Badaruddin I pada kemajuan pembangunan Kesultanan Palembang.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian adalah untuk menjelaskan tentang manfaat dari penelitian itu sendiri. Pada umumnya penelitian mempunyai dua kegunaan, yaitu secara teoritis dan secara praktis.

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi konsep bagi pengembangan ilmu pengetahuan mengenai sejarah lokal Palembang. Terutama kondisi Kesultanan Palembang pada masa SMB I serta kebijakan ekonomi yang dibuat oleh SMB I sehingga Kesultanan Palembang mengalami kemajuan dibidang Pembangunan.

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan intelektual bagi para pembaca yang ingin mengetahui mengenai dampak kebijakan ekonomi Kesultanan Palembang pada masa SMB I serta kemajuan-kemajuan yang dicapai. Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat secara langsung kepada mahasiswa khususnya jurusan Sejarah Peradaban Islam Fakultas Adab dan Humaniora dalam mengembangkan sejarah lokal.

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan unsur penting dari proposal penelitian, karena berfungsi untuk menjelaskan posisi masalah yang diteliti di antara penelitian yang pernah dilakukan peneliti lain dengan maksud untuk menghindari terjadinya duplikasi.¹¹ Sumber-sumber yang digunakan dalam kajian ini baik yang bersifat primer maupun skunder akan memberikan pengetahuan dalam memahami peran SMB I terhadap pembangunan ekonomi. Penelitian ini membutuhkan referensi untuk menambahkan sumber yang berkenaan dengan penelitian ini.

Melalui aktivitas penelusuran terhadap pustaka, peneliti menemukan tulisan yang berkaitan dengan judul yang akan diteliti. Buku *Kesultanan Palembang Darussalam Sejarah dan Warisan Budayanya* yang dikarang oleh Nawiyanto dan Eko Crys Endrayadi tahun 2016, dalam buku tersebut menjelaskan sejarah mengenai Kesultanan Palembang, seperti Palembang masa pra Kesultanan. Masa Kesultanan Palembang Darussalam, struktur pemerintahan dan masyarakat, perekonomian, serta bangunan bersejarah. Masa kejayaan Kesultanan Palembang berlangsung pada abad ke-17 dan ke-18 M. Pada masa ini Palembang tampil sebagai poros penting dalam jaringan perdagangan. Pada masa pemerintahan SMB I, Kota Palembang dibangun menjadi sebuah kota modern.¹²

¹¹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Adab dan Humaniora*, (Palembang: Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Fatah, 2016), hlm. 21.

¹² Nawiyanto dan Eko Crys Endrayadi, *Kesultanan Palembang Darussalam : Sejarah dan Warisan Budayanya*.

Buku terjemahan yang dikarang oleh P. De Roo De Faille, *Dari Zaman Kesultanan Palembang*, dalam buku ini menjelaskan tentang keadaan Palembang dan sejarah Kesultanan Palembang, keadaan pemerintahan di Kesultanan Palembang dijelaskan secara rinci dalam buku ini selain itu kehidupan masyarakat Palembang juga dijelaskan didalam buku ini.

Selanjutnya, dalam buku K.H.O. Gadjahnata dan Sri Edi Swasono (ed.) dengan judul *Masuk dan Berkembangnya Islam di Sumatera Selatan*. Buku ini menyajikan tentang pandangan menyeluruh tentang Kesultanan Palembang Darussalam, mulai dari masuk dan berkembangnya Islam pada masa Kesultanan Palembang, asal-usul Sultan Palembang, pergantian sultan-sultan, pemerintahan, ekonomi dan politik, serta peninggalan sejarah pada masa Kesultanan Palembang¹³

Karya tulis lain seperti *Perubahan Ekonomi dan perkembangan peradaban Islam di Palembang Abad XVII-XIX M: Telaah atas Naskah-naskah Kontrak Sultan Palembang* oleh Endang Rochmiatun, menjelaskan tentang hubungan antara perubahan dan perkembangan ekonomi selama Kesultanan Palembang, terutama di era Sultan Mahmud Badaruddin I menjelaskan juga strategi Sultan Palembang dalam memajukan ekonomi yang mampu memengaruhi perkembangan peradaban Islam di Palembang. Dalam artikel ini menjelaskan bahwa keuntungan dari perdagangan mampu membawa kemakmuran Kesultanan Palembang dan kemajuan peradaban.¹⁴

¹³ K.H.O. Gadjahnata dan Sri Edi Swasono (ed.), *Masuk dan Berkembangnya Islam di Sumatera Selatan*.

¹⁴ Endang Rochmiatun, *Perubahan Ekonomi dan Perkembangan Peradaban Islam di Palembang Abad XVII-XIX: Telaah atas Naskah-naskah Kontrak Sultan Palembang*, dalam: Jurnal

Selanjutnya skripsi yang ditulis oleh Indri Safitri dengan judul *Sejarah Perekonomian Kota Palembang: Masa Pemerintahan Kolonial Belanda, 1825-1942 M*, penelitian ini menjelaskan sejarah perekonomian Kota Palembang pada masa Kolonial Belanda. Skripsi ini juga menjelaskan kondisi perekonomian masa Kesultanan Palembang Darussalam mulai masa awal berdirinya Kesultanan Palembang, keadaan ekonomi sebelum keruntuhan Kesultanan Palembang sampai masa Keresidenan Belanda. Dampak perekonomian terhadap perubahan sosial keagamaan masa keresidenan Palembang.¹⁵

Sepanjang pengetahuan penulis, bahwa penelitian yang berjudul “Sejarah Kebijakan Ekonomi Sultan Mahmud Badaruddin I Terhadap Kemajuan Pembangunan Kesultanan Palembang (1136-1171 H / 1724-1757 M)” belum ada yang meneliti dan diharapkan agar penelitian ini dapat menggambarkan informasi tersebut yang masih belum terungkap serta dapat melengkapi karya sebelumnya.

E. Kerangka Teori

Pada prinsipnya, teori adalah kegiatan berpikir (*mental activity*). Teori merupakan proses pengembangan ide-ide atau pikiran yang memungkinkan kita dapat menjelaskan bagaimana dan mengapa peristiwa itu terjadi.¹⁶ Berdasarkan penjelasan

Lektur Keagamaan, 2015, diakses melalui: <http://jurnallekturkeagamaan.kemenag.go.id> , diakses 3 Mei 2018.

¹⁵ Indri Safitri, “Sejarah Perekonomian Kota Palembang: Masa Pemerintahan Kolonial Belanda, 1825-1942 M”, *Skripsi SI*, (Palembang: Universitas Islam Negeri Raden Fatah, 2017)

¹⁶ Maryani Sujiyati, “Perubahan dan Kesenambungan Tata Ruang Kota Palembang, 1906-1965: Sebuah Tinjauan Morfologi Perkotaan”, *Skripsi SI*, (Palembang: Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah, 2014), hlm. 17.

di atas dalam hal ini yang berkaitan dengan penelitian sebagai sejarah kebijakan ekonomi dan kemajuan pembangunan Kesultanan Palembang.

Pendekatan sejarah ekonomi adalah pendekatan yang penting dalam penulisan sejarah karena pada dasarnya perjalanan suatu sejarah tidak pernah lepas dari pengaruh kepentingan ekonomi. Pembangunan ekonomi berkaitan erat dengan kekayaan manusia, kondisi politik, kondisi sosial, dan latar sejarah.¹⁷ Selain kondisi ekonomi diperlukan faktor lain untuk mengetahui mengenai kemajuan pembangunan pada masa pemerintahan Sultan Mahmud Badaruddin I.

Sebagai pengendali perekonomian, pemerintah harus mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk mencapai tujuan pembangunan. Dalam rangka memajukan dan mengatur perekonomian, pemerintah menggunakan berbagai kebijakan. Kebijakan merupakan rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (pemerintahan, organisasi, dsb.).¹⁸ Hal ini menunjukkan bahwasannya kebijakan yang diambil oleh orang-orang tertentu dalam sistem pemerintahan memiliki tujuan untuk memajukan dan menyejahterakan masyarakat.

Menurut James E. Anderson, kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan. Konsep kebijakan ini memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan

¹⁷ Indri Safitri, "Sejarah Perekonomian Kota Palembang: Masa Pemerintahan Kolonial Belanda, 1825-1942 M", *Skripsi*, (Palembang: Universitas Islam Negeri Raden Fatah, 2017), hlm. 35-38.

¹⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia: Edisi ke-3, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 149.

atau dimaksudkan, dapat membedakan antara dampak-dampak kebijakan dengan hasil kebijakan, dampak kebijakan (*policy outcomes*) lebih merujuk pada akibat-akibatnya bagi masyarakat, baik yang diinginkan maupun yang tidak diinginkan sedangkan hasil-hasil kebijakan lebih berpijak pada manifestasi nyata kebijakan publik.¹⁹

Setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, pasti memiliki tujuan yang baik untuk ketertiban dan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Kebijakan pemerintah memainkan peranan penting dalam mendorong kegiatan ekonomi terhadap pembangunan dan kemajuan. Seperti pada masa SMB I yang membuat kebijakan dalam bidang ekonomi menjadikan Kesultanan Palembang mengalami kemajuan dalam bidang pembangunan, perdagangan, tambang timah serta pertanian dan perkebunan di wilayah Kesultanan Palembang

F. Metode Penelitian

Metode adalah cara atau prosedur untuk mendapatkan objek.²⁰ Menurut Sartono Kartodirjo, metode dibedakan dengan metodologi. Metode lebih merupakan cara bagaimana seseorang memperoleh pengetahuan, sedangkan metodologi memiliki tingkatan yang lebih tinggi karena metodologi ialah mengetahui bagaimana

¹⁹ Mas Sugeng, *Teori Kebijakan Publik*, dalam: <http://www.topihukum.com>, 2013, diakses 1 Oktober 2018.

²⁰ Suhartono W. Pranoto, *Teori dan Metodologi Sejarah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 11.

mengetahui.²¹ Jadi, metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh pemecahan terhadap suatu permasalahan. Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah, yang merupakan suatu proses menguji dan menganalisis secara kritis mengenai sejarah masa lampau.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian studi kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang menjadikan bahan pustaka sebagai datanya. Alasan penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan, karena sumber datanya baik yang primer maupun sekunder semuanya adalah teks. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan *historis* atau sejarah.

Penelitian ini memfokuskan diri untuk menganalisis atau menafsirkan bahan tertulis yang berhubungan dengan kebijakan pada masa SMB I. Bahan tertulis berupa arsip, buku, artikel, jurnal, koran. Dalam mendapatkan data penulis mengunjungi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Arsip Nasional Republik Indonesia, Perpustakaan UIN Raden Fatah Palembang, Perpustakaan Adab dan Humaniora UIN Raden Fatah Palembang, Perpustakaan Daerah Palembang. Penulis berusaha mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan penelitian sebagai pedoman dalam penelitian ini.

²¹ M. Dien Madjid dan Johan Wahyudhi, *Ilmu Sejarah Sebuah Pengantar*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), hlm 217

Tahapan awal dari penelitian ini adalah menentukan topik yang diteliti. Dalam penelitian ini penulis tertarik untuk mengambil judul “Dampak Kebijakan Ekonomi Sultan Mahmud Badaruddin I Terhadap Kemajuan Pembangunan Kesultanan Palembang (1136-1171 H / 1724-1757 M)”

2. Sumber Data

Sumber data merupakan subjek dari mana data-data penelitian diperoleh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yang terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah data yang diperoleh dari sumber yang sezaman, kesaksian daripada seorang saksi dengan mata kepala sendiri atau saksi dengan pancaindera yang lain, atau dengan alat mekanis pada peristiwa yang dikisahkan. Sedangkan sumber data sekunder merupakan kesaksian daripada siapapun yang bukan merupakan saksi pandangan mata, yakni dari seseorang yang tidak hadir pada peristiwa yang dikisahnya.²²

Sumber data primer yang diperoleh dari penelitian ini yaitu naskah kontrak dagang 10 september 1755, yang merupakan perjanjian antara SMB I dengan VOC.

3. Pendekatan

Pendekatan merupakan cara yang digunakan peneliti untuk menghampiri obyek. Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan pendekatan *historis* atau sejarah. Untuk itu, aspek *historis* yang akan dikaji dalam penelitian ini terkait dengan tempat, waktu, latar belakang, pelaku sejarah, serta mendeskripsikan suatu gejala yang telah terjadi dimasa lampau. Pendekatan ekonomi turut digunakan sebagai

²²Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah*, (Jakarta: UI Pers, 2015), hlm. 43.

penguat teori sejarah yang sudah ada. Perkembangan ekonomi, dampak kebijakan ekonomi, serta pengaruhnya terhadap pembangunan pada masa Sultan Mahmud Badaruddin I (1724-1757 M).

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan studi dokumentasi yaitu cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis terutama arsip, buku-buku, jurnal dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian. Tingkat kredibilitas dari hasil penelitian ini ditentukan oleh penggunaan dan pemanfaatan dokumen yang ada.

5. Teknik Analisis Data

Menurut Bogdan analisis data adalah mencari dan mengatur secara sistematis berbagai data yang telah terhimpun untuk menambah pemahaman terhadap suatu obyek yang diteliti.²³ Analisis data merupakan langkah yang sangat kritis dalam melakukan penelitian yang bersifat ilmiah, dari analisis data inilah dapat memecahkan masalah-masalah yang akan diteliti. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptik analitik*, yaitu sebuah teknik pembahasan dengan cara memaparkan masalah dengan analisa, dan memberikan penjelasan yang mendalam mengenai peran SMB I terhadap pembangunan di Kesultanan Palembang (1724-1757 M)

²³ Adnan Mahdi dan Mujahidin, *Panduan Penelitian Praktis untuk Menyusun Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, hlm. 133

Guna menghasilkan suatu tulisan sejarah, dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sejarah. Ada empat tahapan atau langkah dalam metode penelitian sejarah, yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Metode tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Heuristik

Heuristik berasal dari bahasa Yunani yaitu *heuristiken* adalah mengumpulkan atau menemukan sumber. Pengumpulan data atau heuristik merupakan sumber dari dimana data-data tersebut diperoleh.²⁴ Penelitian ini menggunakan dua sumber data yang terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder.

Sumber data primer yang dalam penelitian ini adalah naskah Contract Palembang 10 September 1755. Sedangkan sumber data sekunder sebagai penunjang penelitian ini yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, artikel yang berhubungan dengan judul penelitian.

Bahan-bahan tertulis yang digunakan berupa arsip, buku, artikel, jurnal dan koran. Dalam mendapatkan data, penulis mengunjungi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Arsip Nasional Republik Indonesia, Perpustakaan UIN Raden Fatah Palembang, Perpustakaan Adab dan Humaniora UIN Raden Fatah Palembang, Perpustakaan Daerah Palembang, Perpustakaan Masjid Sultan Mahmud Badaruddin Jayo Wikramo, Perpustakaan Kota Palembang. Penulis berusaha mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan penelitian sebagai pedoman dalam penelitian ini.

²⁴ Suhartono W. Pranoto, *Teori dan Metodologi Sejarah*, hlm. 29.

2. Verifikasi

Kritik sumber atau verifikasi merupakan tahap pengujian sumber-sumber sejarah untuk mengetahui kebenaran dan mendapatkan fakta-fakta sejarah yang sesungguhnya. Setelah sumber-sumber telah dikumpulkan kemudian diverifikasi atau diuji melalui serangkaian kritik. Terdapat dua jenis kritik sumber, yaitu *eksternal* dan *internal*. Kritik *eksternal* merupakan pengujian keaslian atau *otentisitas* suatu sumber atau dokumen agar diperoleh suatu sumber yang benar-benar asli. Sedangkan kritik *internal* tahap pengujian lebih jauh mengenai isi dokumen untuk menentukan kebenaran dari isi dokumen tersebut.²⁵

Verifikasi dilakukan untuk menemukan fakta mengenai kebijakan ekonomi serta kemajuan Kesultanan Palembang pada masa SMB I. Sumber-sumber yang di verifikasi berupa arsip kontrak dagang antara Sultan Mahmud Badaruddin I dengan kolonial Belanda, serta buku-buku yang berkaitan dengan penelitian. Setiap sumber yang didapat akan dilakukan tahap pengujian dan analisis. Data-data sejarah yang sudah melewati tahap pengujian dan dapat dipercaya kebenarannya yang dapat digunakan dalam penelitian ini.

3. Interpretasi

Interpretasi merupakan tahap dimana peneliti melakukan penafsiran terhadap sumber-sumber mengenai fakta-fakta yang diperoleh selama penelitian. Fakta-fakta

²⁵ A. Daliman, *Metode Penelitian Sejarah*, (Yogyakarta: Ombak, 2012), hlm. 66

tersebut akan disusun dan digabungkan sehingga menghasilkan suatu gambaran yang jelas mengenai peristiwa sejarah tersebut.²⁶

Data-data yang telah melewati proses verifikasi selanjutnya di interpretasi, dimana data yang berupa arsip serta buku-buku yang berkaitan dengan perekonomian serta kebijakan SMB I dalam pembangunan Kesultanan Palembang dari tahun 1724-1757 M ditafsirkan kemudian disusun dan dihubungkan antara data yang satu dengan data yang lainnya, sehingga nanti didapat sebuah fakta sejarah mengenai “Dampak Kebijakan Ekonomi SMB I Terhadap Kemajuan Pembangunan Kesultanan Palembang (1136-1171 H / 1724-1757 M).”

4. Historiografi

Tahapan akhir dari penelitian ini adalah historiografi. Pada tahap inilah penulisan sejarah dilakukan, dimana peneliti menyusun hasil penelitian yang telah diperoleh sehingga menjadi satu kesatuan sejarah yang utuh.²⁷

Penelitian yang telah melalui tahap heuristik, verifikasi dan interpretasi, maka tahapan terakhir peneliti melakukan penulisan sejarah. Hasil dari penelitian yang dilakukan adalah dalam bentuk skripsi yang berjudul “Dampak Kebijakan Ekonomi Sultan Mahmud Badaruddin I Terhadap Kemajuan Pembangunan Kesultanan Palembang (1136-1171 H / 1724-1757 M)”.

²⁶ M. Dien Madjid dan Johan Wahyudi, *Ilmu Sejarah Sebuah Pengantar*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), hlm. 225.

²⁷ A. Daliman, *Metode Penelitian Sejarah*, hlm. 66

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam skripsi ini dibagi lima bab, yaitu:

Bab I Pendahuluan. Membahas beberapa permasalahan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan dan batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Masa Kepemimpinan Sultan Mahmud Badaruddin I. dalam bab ini membahas mengenai biografi Sultan Mahmud Badaruddin I serta proses pengangkatan SMB I menjadi sultan.

Bab III Kondisi Ekonomi Sebelum dan Sesudah Masa Sultan Mahmud Badaruddin I (1136-1171 H / 1724-1757 M). Pembahasan dalam bab ini meliputi: kehidupan masyarakat Palembang, kondisi ekonomi sebelum masa SMB I, kondisi ekonomi pada masa SMB I.

Bab IV Dampak Kebijakan Sultan Mahmud Badaruddin I Terhadap Kemajuan Pembangunan Kesultanan Palembang. Bab ini menguraikan tentang kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh SMB I serta bentuk-bentuk kebijakan ekonomi SMB I yang berdampak terhadap kemajuan dan pembangunan kota Palembang.

Bagian V Penutup. Bab ini terdiri dari simpulan dan saran-saran dari hasil penelitian. Simpulan dalam bab ini merupakan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang dirumuskan dalam rumusan masalah.

BAB II

MASA KEPEMIMPINAN SULTAN MAHMUD BADARUDDIN I

A. Biografi Sultan Mahmud Badaruddin I²⁸

Sultan Mahmud Badaruddin I merupakan anak Sunan Muhammad Mansur Kebon Gede bin Sunan Abdurrahman Candi Walang bin Pangeran Sido Ing Pesarean bin Pangeran Manca Negara Cirebon bin Pangeran Adipati Sumedang bin Pangeran Wira Kesuma Cirebon bin Sunan Giri. Ibunya bernama Nyimas Sengak binti Dipu Anom Priayi Jambi. SMB I dilahirkan sekitar tahun 1103 H atau 1690 M di lingkungan Keraton Palembang yang merupakan putra ke 3 dari 5 bersaudara.

Pendidikan awalnya didapat dari ayahnya sendiri, kemudian menuntut ilmu agama pula kepada ulama-ulama besar Palembang waktu itu, seperti: Faqih Jalaluddin, Khatib Amir, Sayid al-Idrus, dan masih banyak lagi. SMB I juga mengamalkan Tarekat Naqsyabandiah, selain itu Ia juga seorang hafiz yang hafal al-Qur'an 30 juz.

Selain dikenal sebagai ulama dan waliyullah, Ia sebagai sosok yang gagah berani, tokoh pembangunan dan seorang petualang yang kompromistis. Pengembaraannya sampai ke Makasar, Johor, Kelantan, Kedah, Siam, Timur Tengah dan lain-lain. Ia juga menjadi imam, khatib, guru agama dan penulis. Salah satu nama kitab karangannya adalah *Tahqidul Yakin*.

²⁸ Yayasan Masjid Agung Palembang, “*Selayang Pandang Masjid Sultan Mahmud Badaruddin*” Palembang: 2019, hlm. 9-11

Selain itu SMB I juga dibekali dengan ilmu-ilmu kepemimpinan atau siasah, tata negara, beladiri dan sebagainya agar kelak dapat meneruskan jalannya roda pemerintahan yang diwariskan kepadanya.

Sultan Mahmud Badaruddin I sendiri merupakan seseorang yang taat beragama dan sering menjadi imam sembahyang di masjid. Selain itu Beliau adalah seorang tokoh yang jujur, pekerja keras, mengutamakan kepentingan umum. Selain itu sang sultan juga sangat peduli terhadap kesejahteraan rakyatnya. Berdasarkan apa yang dikemukakan di atas menggambarkan bagaimana karakter sultan terlihat dalam kehidupan kesehariannya sebagai seorang pemimpin.

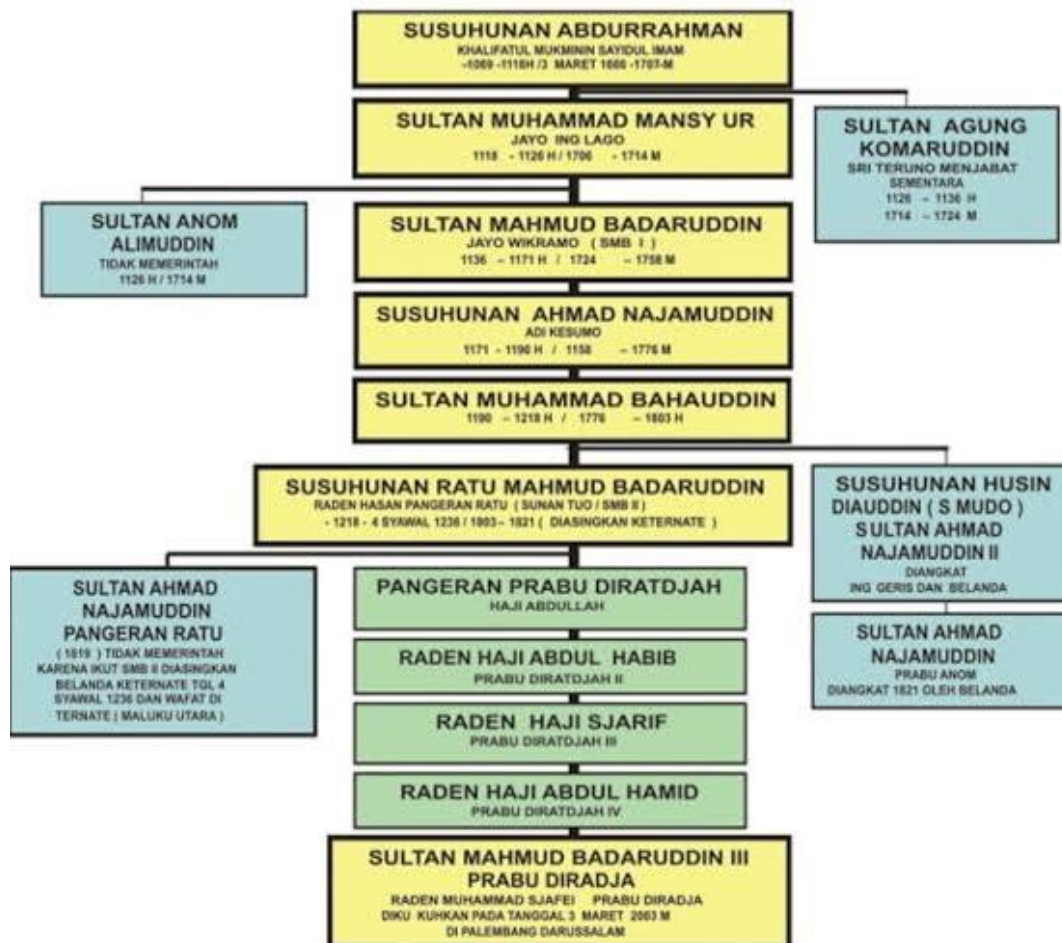
Sultan Mahmud Badaruddin Jayo Wikramo memiliki dua belas orang istri, masing-masing mereka adalah: Fatimatuazzahra binti Ibrahim (dari Kelantan), Masayu Ratu (dari Siantan), Raden Ayu Ranga binti Sultan Agung Komaruddin (Palembang), Nyimas Naimah binti Kemas Tumenggung Jumpong (mertua Jero Pager) di Palembang Lamo, Raden Ayu Ciblung binti Pangeran Subekti, Zaimah Masayu Ratu binti Datuk Dalam bin Datuk Nandam Cina negeri Siantan, Nyimas Milam, Nyimas Ropit, Nyai Dalam anak Cina (Semarang), dan Nyimas Bakul. Dari pernikahannya, ia dikaruniai sekitar 33 orang anak.

Sultan Mahmud Badaruddin Jayo Wikramo wafat pada malam Sabtu, tanggal 3 Muharram 1171 H bersamaan 17 September 1757 M dalam usia 68 tahun. Dimakamkan di Kawah Tekurep di Lemabang 3 Ilir Palembang. Lemabang berasal dari kata-kata “Lemah Abang” yang berarti Tanah Merah, sebab disaat sultan hendak membangun komplek pemakamannya sendiri dalam tahun 1728 di daerah Lemah

Luhur (tanah tinggi), kondisi tanahnya miring/tidak rata, lantas ditimbun oleh sang Sultan dengan tanah merah. Oleh karena itu, Ia dikenal masyarakat dengan sebutan Sunan Lemabang.

B. Silsilah Kesultanan Palembang

SILSILLAH ASAL USUL SULTAN SULTAN PALEMBANG DARUSSALAM



Sumber: [Http://kesultananpalembangdarussalam.blogspot.com](http://kesultananpalembangdarussalam.blogspot.com)

C. Pengangkatan Menjadi Sultan

Pangeran Jayo Wikramo diangkat menjadi sultan Palembang pada usia 34 tahun, Ia diangkat oleh pamannya Sultan Agung Komaruddin Sri Truno. Dinobatkan pada hari Kamis tanggal 27 Jumadil Akhir 1136 H bersamaan tanggal 23 Maret 1724 M pukul 13.00 dengan gelar Sultan Mahmud Badaruddin (SMB I).²⁹

Sultan Mahmud Badaruddin I adalah seorang sultan dari Kesultanan Palembang Darussalam yang memerintah antara 1724-1757. Pengangkatannya mengakhiri periode perebutan kekuasaan antar kerabat kerajaan yang telah berlangsung sejak wafatnya Sultan Abdurrahman pada tahun 1706 M.³⁰

Mahmud Badaruddin dianggap sebagai seorang sultan yang berhasil memerintah dengan baik dan bijaksana. Ia mendapatkan dukungan dari para bangsawan, serta bertukar-pikiran dengan mereka dalam menjalankan pemerintahannya. Konflik utama Kesultanan Palembang pada masa pemerintahannya ialah dengan Kesultanan Banten; yaitu memperebutkan kekuasaan atas Lampung, yang selain merupakan penghasil lada juga telah mulai memproduksi emas sejak tahun 1730-an.

²⁹ ²⁹ Yayasan Masjid Agung Palembang, “*Selayang Pandang Masjid Sultan Mahmud Badaruddin*” Palembang: 2019, hlm. 10

³⁰ www.Wikipedia.org, diakses pada: 14 Juni 2019.

BAB III
KONDISI EKONOMI SEBELUM DAN SESUDAH
MASA SULTAN MAHMUD BADARUDDIN I (1136-1171 H / 1724-1757 M)

Palembang merupakan salah satu kawasan di wilayah Nusantara yang secara historis memainkan peranan yang sangat penting.³¹ Hal itu dikarenakan, di Palembang pernah berdirinya dua kerajaan besar yaitu Sriwijaya dan Kesultanan Palembang Darussalam yang pada saat itu menguasai jalur perdagangan dalam negeri dan luar negeri.

Sebagai satuan politik Palembang dimaknai sebagai pusat kekuasaan dan wilayah pengaruhnya dengan kerajaan Sriwijaya sebagai akar sejarahnya hingga masa Kesultanan Palembang Darussalam.³² Palembang sejak semula tumbuh dan berkembang sebagai pusat kuasa maritim, baik pada masa pra-Islam maupun pada masa perkembangan Islam. Masyarakat kota pusat kerajaan maritim seperti Palembang menitik beratkan kehidupannya pada pelayaran dan perdagangan.³³

Masyarakat Kota Palembang dan sekitarnya telah memiliki tradisi kemaritiman sejak lama, pada abad ke-7 sampai abad ke-13 Masehi, Kerajaan Sriwijaya mampu menguasai Nusantara. Munculnya Kesultanan Palembang pada abad ke-17 sampai abad ke-19 telah melatar belakangi kehidupan masyarakat Palembang. Periode ini menjadi menarik ketika dihubungkan dengan dunia pelayaran

³¹ Nawiyanto dan Eko Crys Endrayadi, *Kesultanan Palembang Darussalam : Sejarah dan Warisan Budayanya*, hlm. 15

³² *Ibid.*, hlm. 7

³³ Ma'moen Abdullah, *Sejarah Daerah Sumatera Selatan*, (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sumsel, 1991), hlm. 89

dan perdagangan sebab Kesultanan Palembang telah menjalin kerja sama dengan VOC (*Verenigde Oost Indische Compagnie*) pada 1642.³⁴ Dalam berbagai sumber sejarah, dikatakan bahwa Palembang sering digambarkan sebagai tempat yang banyak airnya. Dengan kondisi seperti ini, dataran yang tinggi atau tanah kering lebih sulit untuk dijumpai. Oleh karena itu masyarakat menggunakan perahu sebagai alat transportasi.

Sebelum menyajikan kehidupan sektor perekonomian Kesultanan Palembang masa SMB I, kiranya perlu disajikan terlebih dahulu keadaan penduduk Palembang. Mereka inilah yang berperan sebagai penggerak utama roda perekonomian Kesultanan Palembang Darussalam baik dengan terjun dalam sektor pertanian, perikanan, pengambilan hasil hutan, pertambangan, kerajinan, serta perdagangan.³⁵ Oleh karena itu, kegiatan-kegiatan ekonomi di Kesultanan Palembang tidak terlepas dari peran penduduk Palembang itu sendiri.

A. Kehidupan Masyarakat Palembang

1. Kondisi Sosial

Rakyat Kesultanan Palembang biasa disebut *Matagawe*, khususnya rakyat yang tinggal di pedalaman. Konsep *Matagawe* mengacu pada pengertian bahwa setiap orang yang telah dianggap dewasa atau sudah kawin dan mempunyai tempat tinggal sendiri secara otomatis mendapatkan status sebagai rakyat Kesultanan.

³⁴ Supriyanto, *Pelayaran dan Perdagangan di Pelabuhan Palembang 1824-1864*, (Yogyakarta: Ombak 2013), hlm. 2

³⁵ Nawiyanto dan Eko Crys Endrayadi, *Kesultanan Palembang Darussalam : Sejarah dan Warisan Budayanya*, hlm. 69

Diperolehnya status ini membawa konsekuensi bagi mereka, yakni kewajiban untuk menyerahkan. *gawe* (kerja) bagi kepentingan raja atau sultan. Kewajiban ini adalah bentuk imbal balik atas anugerah hak yang telah diperolehnya dari raja untuk menempati dan mengerjakan tanah. Secara adat diyakini bahwa semua tanah di wilayah kesultanan adalah milik Sultan.³⁶

Penduduk di Palembang lebih berdasarkan atas kelompok-kelompok yang terdiri dari multi etnis. Sebagian penduduk bertempat tinggal di daerah pusat kota atau Ibukota dan daerah pinggiran kota, yang disebut daerah Uluan dan Iliran. Sebagian yang lain bermukim di daerah pedalaman dan pulau Bangka Belitung.³⁷ Selain penduduk lokal, etnis yang tergabung dalam daerah Palembang yaitu, Cina, India, Arab.

Rakyat Palembang digambarkan hidup dalam rumah-rumah rakit yang terbuat dari kayu yang diikatkan dengan tali-tali pada tiang-tiang. Pada saat air sungai mengalami arus pasang, rumah-rumah rakit tersebut akan terapung. Bila ingin pindah ke tempat lain, penduduk tinggal mencabut tiangnya dan mereka akan pindah bersama-sama dengan rumahnya tanpa mengalami kesulitan sama sekali.³⁸ Perekonomian masyarakat Palembang pada masa lalu sangat bergantung pada sungai, oleh karena itu banyak dari mereka memilih untuk tinggal di rumah rakit. Namun jika dilihat sekarang keadaannya sangat bertolak belakang, rumah rakit di Palembang

³⁶ Nawiyanto dan Eko Crys Endrayadi, *Kesultanan Palembang Darussalam : Sejarah dan Warisan Budayanya*, hlm. 57

³⁷ Supriyanto, *Pelayaran dan Perdagangan di Pelabuhan Palembang 1824-1864*, (Yogyakarta: Ombak, 2013), hlm. 33

³⁸ Djohan, Hanafiah, *Melayu-Jawa: Citra Budaya dan Sejarah Palembang*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995, hlm. 102-103

keberadaannya sudah sangat sedikit. Kebanyakan dari masyarakat memilih untuk tinggal di darat dibandingkan di atas sungai.

Penduduk Palembang dikenal sebagai pekerja-pekerja tangan yang sangat teliti. Cara mereka mengerjakan kayu begitu sempurna, seperti memahat dan membuat bangunan. Selain itu, dalam hal pekerjaan tembaga dan besi mereka sangat baik dengan membuat senapan, pedang, dan keris juga dibuat dengan sangat baik. Wanita-wanita Palembang juga tidak kurang cerdasnya dalam hal pekerjaan tangan. Sutra-sutra terbaik dan kain-kain yang diselengi dengan benang emas. Mereka sangat pandai menyulam dan melukis berbagai bentuk.³⁹ Masyarakat Palembang hidup dengan mandiri dan mempunyai keahlian masing-masing. Salah satu hasil kerajinan tangan yang masih dikenal dan dibuat sampai saat ini yaitu kain tenun songket yang merupakan ciri khas kerajinan tangan dari Palembang.

Selain itu Palembang dan daerah pantai timur mempunyai lingkungan fisik yang didominasi oleh perairan darat, berupa sungai, rawa dan lebak. Lingkungan perairan seperti itu mengandung sumberdaya bagi pemenuhan kehidupan manusia. Hubungan yang erat terjalin dengan lingkungan fisik daerah dataran rendah aliran sungai juga berimbas pada cara hidup masyarakat Palembang sejak dulu sampai sekarang.⁴⁰

³⁹ Nawiyanto dan Eko Crys Endrayadi, *Kesultanan Palembang Darussalam : Sejarah dan Warisan Budayanya*, hlm. 77

⁴⁰ Retno Purwanti: "Mata Pencapaian di Daerah Hilir" dalam: *Musi Menjalin Peradaban, Warisan Budaya sebagai Identitas*, (Palembang: Tunas Gemilang, 2012), hlm 141.

Kondisi tanah daerah Palembang sangat cocok untuk jenis-jenis tanaman, seperti sayuran, buah-buahan serta tanaman yang laku dipasaran dunia, yaitu cengkeh, kopi, dan lada.⁴¹ Sistem tanam yang dilakukan penduduk masih sederhana atau bersifat tradisional, yaitu ladang berpindah. Oleh sebab itu sebagian penduduknya, terutama yang berada didaerah pedalaman dalam kehidupan kesehariannya lebih ditentukan oleh tanah pertanian.⁴² Berbeda dengan masyarakat yang tinggal di pinggir kota, kehidupan mereka bergantung dengan sungai. Oleh karena itu masyarakat yang tinggal di pedalaman sebagian besar bekerja sebagai petani sedangkan masyarakat yang tinggal di pinggir sungai bekerja sebagai pedagang.

2. Kondisi Ekonomi

Menurut Sumardi dan Evers, kondisi ekonomi adalah suatu kedudukan yang secara rasional dan menetapkan seseorang pada posisi tertentu dalam masyarakat. Pemberian posisi itu disertai pula dengan seperangkat hak dan kewajiban yang harus dilakukan.⁴³ Jadi kondisi ekonomi mempengaruhi kedudukan sosial seseorang di dalam masyarakat.

Keadaan perekonomian yang masih primitif, sebagian besar kehidupan ekonomi sering diatur sedemikian rupa, pertukaran diantara individu atau suku,

⁴¹ J.I. Van Sevenhoven, *Lukisan Tentang Ibu Kota Palembang*, hlm.53

⁴² Supriyanto, *Pelayaran dan Perdagangan di Pelabuhan Palembang 1824-1864*, (Yogyakarta: Ombak, 2013), hlm. 31

⁴³ Uniek Yuniar Vili Hastuti, *Kajian Kondisi Sosial*, (Palembang: FKIP UMP, 2015), hlm. 9

pekerjaan seseorang dalam pembagian kerja yang ada, sumbangan yang harus dibayar pada penguasa dan lain sebagainya.⁴⁴

Sistem pertanian masyarakat masih sederhana, hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan sendiri dan sebagian dari hasil pertanian mereka dijual. Untuk mengolah lahan pertaniannya, mereka menggunakan *pawang* atau kapak. Komoditas hasil pertanian Palembang adalah lada dan hasil alam dari Palembang adalah timah.⁴⁵ Sebagian besar mata pencaharian penduduk Palembang adalah sebagai petani, menangkap ikan, mengumpulkan hasil hutan, tambang serta berdagang. Masyarakat Palembang pada masa itu mengandalkan sumber daya alam yang dijual serta hasil perdagangan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Lapisan masyarakat kebanyakan atau non-elite dari Kerajaan Maritim ini, selain berdagang juga menangkap ikan, bertukang (tukang rumah, tukang emas, perak, besi untuk alat-alat rumah tangga dan pertanian, tukang perahu) membuat jala, menganyam dan lain-lain. Bagi kaum wanita menenun songket, membatik, menyulam, dan membuat makanan untuk dijajakan. Masyarakat pada masa itu biasa hidup berkelompok sesuai dengan keterampilan mereka dan biasa tinggal sesuai dengan keahliannya.⁴⁶

Perdagangan menjadi mata pencaharian utama bagi penduduk Palembang, dikarenakan kebanyakan penduduk Palembang tinggal di sekitar kawasan Sungai

⁴⁴ Ravico, "Konflik Elit Politik di Kesultanan Palembang Darussalam tahun 1803-1821", *Tesis*, Palembang: Universitas Islam Negeri Raden Fatah, 2013, hlm.

⁴⁵ Farida R. Wargadalem, *Kesultanan Palembang dalam Pusaran Konflik (1804-1825)*, hlm. 26

⁴⁶ Ma'moen Abdullah, ed., *Sejarah Daerah Sumatera Selatan*, (Palembang: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumsel, 1991/1992), hlm. 89

Musi yang dekat dengan pelabuhan karena sudah terbiasa berdagang dan bisa dikatakan penduduk Palembang memiliki bakat dalam berdagang.

Dikatakan bahwa ciri perekonomian masyarakat sungai, sebelah kaki menginjak tanah “becek” dan sebelah lagi bertumpu di atas perahu untuk berdagang. Aktivitas perdagangan inilah yang sejak masa Kerajaan Sriwijaya menjadi urat nadi perekonomian masyarakat Palembang dan kawasan pantai timur Sumatera Selatan.⁴⁷

Sedangkan daerah-daerah pedalaman yang kehidupan perekonomiannya tergantung pada pertanian tradisional (berladang) mengumpulkan hasil-hasil hutan, menangkap ikan dan lain-lain, membutuhkan pasar tempat menjual hasil-hasil daerahnya itu, di samping mereka membutuhkan garam, candu, bahan pakaian yang kasar atau murah dari kota Palembang.⁴⁸ Hasil dari pertanian masyarakat pedalaman kemudian mereka jual dengan menggunakan perahu-perahu membawa barang dagangan menuju Ibukota. Aktivitas kehidupan masyarakat Kesultanan Palembang terikat dengan sungai dan perairan daripada dengan daratan.

Perkembangan kota Palembang tidak terlepas dari sejarah perkembangan pelabuhan yang berada di bagian Ilir Sungai Musi. Pesatnya jalur perdagangan melalui jalur sungai juga tak terlepas oleh peran penting pasar. Pada umumnya kehidupan perekonomian banyak terjadi di pasar, seperti perdagangan dan perusahaan.

⁴⁷ Retno Purwanti, Mata Pencaharian di Daerah Hilir dalam: *Musi Menjalin Peradaban, Warisan Budaya sebagai Identitas*. hlm. 141

⁴⁸ P. De Roo De Faille, *Dari Zaman Kesultanan Palembang (terj.)*, (Jakarta: Bhratara, 1971), hlm. 86

3. Kondisi Politik

Sebagai penguasa tertinggi, sultan adalah satu-satunya pemilik atas tanah di seluruh wilayah kesultanan dan berkuasa untuk memberikan tanah tersebut kepada orang-orang yang dikehendaknya. Tidak mengherankan, sultan biasa mendapatkan layanan tenaga kerja dari rakyatnya baik untuk pekerjaan di ibukota maupun di wilayah luar ibu kota. Sultan juga mendapatkan penghasilan dalam jumlah besar dari berbagai sumber.⁴⁹ Di antara sumber pendapatan SMB I selain berdagang dan hasil tambang juga penarikan pajak dan beacukai.

Adanya prasarana dan sarana dalam perdagangan lokal dan internasional di Palembang. Secara Internasional (Nusantara) telah berlaku “Undang-Undang Laut Malaka”, suatu hukum Melayu dimana adanya pengadilan untuk pedagang-pedagang asing yang diadakan bagi bangsa-bangsa mereka, yang dilaksanakan oleh Syahbandar dengan dibantu oleh beberapa nahkoda. Pedagang juga memiliki syahbandar yang bertugas sepanjang menyangkut kepentingan raja, harus melindungi pedagang-pedagang dari gangguan rakyat, melancarkan perdagangan dan urusan mereka dan mengusahakan agar piutang mereka dibayar, juga menerima bea dari pedagang-pedagang itu.⁵⁰

Di dalam bidang pemerintahan, sultan dibantu pepatih dalam melaksanakan perintah-perintahnya. Pepatih inilah yang mengawasi pengumpulan pendapatan

⁴⁹ Nawiyanto dan Eko Crys Endrayadi, *Kesultanan Palembang Darussalam : Sejarah dan Warisan Budayanya*, hlm. 55

⁵⁰ Djohan Hanafiah, *Kesultanan Palembang Darussalam dalam Perspektif Sumatera Selatan*, dalam: *Perang Palembang Melawan VOC*.(ed.), (Palembang: Karyasari,1996), hlm. 52

kesultanan, menerima laporan semua urusan kerajaan, menyampaikan usulan terkait urusan pajak dan kerja wajib bagi sultan, menguasai alat-alat perlengkapan perang, memberikan nasehat dan pertimbangan kepada sultan terkait kebijakan yang dibuatnya.⁵¹ Dalam urusan politik sultan dibantu oleh pejabat-pejabat kesultanan yang telah dipilih sultan untuk melancarkan segala urusan politik.

Struktur masyarakat Palembang tersusun atas empat golongan, yakni raja atau sultan, golongan bangsawan, golongan rakyat, dan golongan budak. Struktur ini berlaku khususnya bagi masyarakat pribumi baik yang tinggal di ibukota kesultanan maupun penduduk yang bermukim di daerah pedalaman.⁵² Begitu juga pada masa pemerintahan Kesultanan SMB I struktur masyarakat Palembang masih tetap sama seperti sebelum masa SMB I.

Politik dalam negeri yang dijalankan di Kesultanan Palembang selama berdirinya lebih kurang 50 tahun membuktikan telah berhasil menciptakan organisasi pemerintahan yang cukup stabil, dimana ketentraman dan keamanan bagi penduduk dan perdagangan yang cukup memadai.⁵³

Jika melihat dari sudut administrasi pemerintahan, wilayah Kesultanan Palembang Darussalam dibagi menjadi empat kawasan. Kawasan pertama adalah ibukota dengan istana atau keraton sebagai inti kesultanan. Di luar ibukota dikenal

⁵¹ Nawiyanto dan Eko Crys Endrayadi, *Kesultanan Palembang Darussalam : Sejarah dan Warisan Budayanya*, hlm. 60

⁵² Nawiyanto dan Eko Crys Endrayadi, *Kesultanan Palembang Darussalam : Sejarah dan Warisan Budayanya*, hlm. 54

⁵³ Ali Amin, "Sejarah Kesultanan Palembang Darussalam dan Beberapa Aspek Hukumnya", dalam K.H.O. Gadjahnata dan Sri Edi Swasono (ed.), *Masuk dan Berkembangnya Islam di Sumatera Selatan*, hlm. 100

adanya tiga kawasan yang berbeda, yakni daerah *Sikap*, daerah *Kepungutan*, dan daerah *Sindang*. Keraton sebagai tempat kediaman Sultan merupakan pusat pemerintahan ibukota. Sementara itu, daerah di luar ibukota membentuk struktur pemerintahan dengan pola yang berbeda. Secara sederhana dapat dibedakan antara pemerintahan untuk wilayah uluan dan wilayah iliran. Pusat kekuasaan Kesultanan Palembang Darussalam terletak di kawasan iliran dan penduduknya adalah Kawula Istana. Sementara itu, melewati kawasan *Iliran* adalah wilayah *Uluan* dan di kawasan ini orang-orang asing non-kawula bermukim.⁵⁴

Di Palembang juga dibagi beberapa kawasan seperti daerah *Kepungutan* juga dikenal sebagai wilayah *Iliran*. Karakteristik utama yang tampak di kawasan ini adalah berlakunya kekuasaan sultan dan pejabat istana untuk melakukan pungutan pajak maupun layanan tenaga kerja. Di kawasan *Iliran* masyarakatnya mempunyai orientasi yang kuat pada kegiatan di sektor perdagangan Daerah *Sindang* yang berarti perbatasan adalah kawasan yang biasa disebut masyarakat setempat sebagai kawasan *Uluan*. Masyarakat *Sindang* diatur dengan perangkat hukum tersendiri, yang dinamakan Undang-Undang *Sindang Merdeka*.⁵⁵ Di wilayah kekuasaan Kesultanan Palembang dibagi beberapa daerah yang memiliki pengawasan tersendiri yang setiap wilayahnya diharuskan untuk membayar pajak kepada Sultan.

⁵⁴ Nawiyanto dan Eko Crys Endrayadi, *Kesultanan Palembang Darussalam : Sejarah dan Warisan Budayanya*, hlm. 49

⁵⁵ Nawiyanto dan Eko Crys Endrayadi, *Kesultanan Palembang Darussalam : Sejarah dan Warisan Budayanya*, hlm. 54

Di Palembang rakyat di desa-desa menganggap raja sebagai pemilik tanah dan mereka sendiri hanya mendapat manfaat sebagai orang yang “Tunggu Tanah Raja”. Kewajiban pokok dari rakyat adalah melakukan kerja bakti kepada Raja di Ibukota atau di luar, bukan saja untuk kepentingan umum tetapi berdasarkan perintah Raja. Untuk melakukan kerja bakti ini terkadang berbulan-bulan ratusan wajib kerja berada di Ibukota. Mereka harus hidup atas biaya sendiri, sebab mereka akan mendapat keuntungan atas sawah, kebun dan halaman rumah tanpa harus membayar pajak.⁵⁶

B. Kondisi Ekonomi Sebelum Masa SMB I

Palembang menjadi ibukota Kesultanan Palembang Darussalam dari tahun 1553 hingga 1814. Masa kejayaan Kesultanan Palembang berlangsung pada abad ke-17 dan ke-18. Pada masa kejayaannya ini Palembang tampil sebagai poros penting dalam jaringan perdagangan di perairan Malaka dan pantai utara Jawa. Seorang penulis Inggris, Marsden menggambarkan pelabuhan Palembang merupakan pelabuhan yang sangat ramai. Banyak kapal berkunjung di pelabuhan ini, dari Jawa, Madura, Bali dan Sulawesi. Beragam komoditas dagang dibawa oleh kapal-kapal tersebut masuk ke Palembang.⁵⁷

Pada awal Kesultanan Palembang Darussalam tahun 1659-1724 memiliki aktivitas ekspor dan impor. Distribusi komoditas ekspor-impor membuat lalu lintas perdagangan darat maupun air menjadi ramai. Komoditas ekspor-impor yang menjadi

⁵⁶ P. De Roo De Faille, *Dari Zaman Kesultanan Palembang (terj.)*, (Jakarta: Bhratara, 1971), hlm. 43

⁵⁷ Nawiyanto dan Eko Crys Endrayadi, *Kesultanan Palembang Darussalam : Sejarah dan Warisan Budayanya*, hlm. 36

primadona adalah lada dan timah.⁵⁸ Pada masa Kyai Mas Endi, Sultan membangun hubungan dengan daerah pedalaman melalui Undang-Undang Simbur Cahaya yang masih efektif diberlakukan. Undang-Undang Simbur Cahaya menyuplai dana yang berasal dari pajak yang telah ditetapkan. Sultan seringkali melakukan perjalanan ke daerah hulu selama tahun 1691-1706 untuk memantau berjalannya pajak-pajak yang semakin banyak mengalir masuk kedalam kas Kesultanan. Penguasa-penguasa di Pasemah yang periode sebelumnya kurang berintegrasi kepada Kesultanan, kini menerima baik perlindungan Sultan.⁵⁹

Kondisi ekonomi masa Abdurrahman Khalifatul Mukminin Syaidul Iman atau Kyai Mas Endi, terlihat kemajuan ekonomi di beberapa kebijakan-kebijakan tata kota dan ekonomi. Melalui kebijakan tersebut beliau memindahkan Keraton Kuto Gawang ke Beringin Janggut. Kebijakan-kebijakan ekonomi masa awal Kyai Mas Endi memusatkan pada pembangunan kembali Kesultanan akibat permusuhan dengan Belanda. SMB I membangun mengambil keuntungan ekonomi kesultanan.⁶⁰

Hubungan perdagangan terjadi antara Palembang dengan Pulau Jawa, Lingga, Riau, Singapura, Pulau Penang, Malaka, Negeri Siam dan Cina. Pada awal Kesultanan Palembang Darussalam, lada telah menjadi komoditas perdagangan yang berarti bagi Kesultanan. Saat itu lada dimonopoli oleh kerajaan Banten. Dahulunya lada dibeli oleh pedagang-pedagang India dan Tionghoa. Kemudian setelah

⁵⁸ Indri Safitri. *Sejarah Perekonomian Kota Palembang: Masa Pemerintahan Kolonial Belanda, 1825-1942 M.*, hlm. 55

⁵⁹ Salman Aly, *Sejarah Kesultanan Palembang*, hlm. 153

⁶⁰ Indri Safitri. "Sejarah Perekonomian Kota Palembang: Masa Pemerintahan Kolonial Belanda, 1825-1942 M". *Skripsi*. (Palembang: Universitas Islam Negeri Raden Fatah. 2017), hlm. 53

ditemukan jalan lautan maka datanglah permintaan dari Eropa. Palembang sangatlah penting bagi perkembangan perekonomian, dibuktikan kota ini sebagai rebutan oleh Inggris dan Belanda saat Malaka jatuh ketangan Portugis.⁶¹ Terdapat banyak barang dagang yang diperjual belikan pada masa awal Kesultanan Palembang. Selain itu terjadinya perdagangan ekspor dan impor barang dagang yang banyak dibutuhkan pada masa itu.

Kota Palembang merupakan bandar yang strategis, karena letaknya di kedua tepi Sungai Musi yang lebar dan dalam sehingga dapat dilayari oleh kapal-kapal sampai jauh ke pedalaman.⁶² Dalam banyak tulisan mengatakan bahwa Palembang merupakan Kota Bandar. Dikatakan juga bahwa daerah Palembang ramai dikunjungi sejak masa Kerajaan Sriwijaya oleh orang-orang baik itu berasal dari India, Arab, Cina, maupun dari dalam negeri untuk keperluan perdagangan.

C. Kondisi Ekonomi Pada Masa SMB I

Sistem perekonomian pada masa Sultan Mahmud Badaruddin I pada dasarnya merupakan kelanjutan dari masa sebelumnya sehingga sistem pendapatan pemerintahan Kesultanan sedikit banyak merupakan pengembangan sumber perekonomian yang sebelumnya telah berlaku.⁶³ Berbagai sumber pendapatan Kesultanan Palembang yaitu Sultan Mahmud Badaruddin I yang paling penting

⁶¹ Indri Safitri. *“Sejarah Perekonomian Kota Palembang: Masa Pemerintahan Kolonial Belanda, 1825-1942 M,”* hlm. 57

⁶² Endang Rochmiatun, *Ulama dan perkembangan Lektur Islam di Palembang*, hlm. 49

⁶³ Djoko Suryo. *Ekonomi Masa Kesultanan*. dalam: “Ensiklopedi Tematis Dunia Islam jilid 5:Asia Tenggara”, hlm. 271

adalah bersumber dari kegiatan perdagangan, pertanian maupun pertambangan yang mengalami kemajuan dan peningkatan pada masa kekuasaan SMB I

1. Perdagangan

Perdagangan adalah semua kegiatan yang dilakukan dengan tujuan menjual barang dagang untuk mendapatkan keuntungan, kegiatan perdagangan ini dilakukan oleh masyarakat sebagai produsen kepada konsumen. Seperti halnya di Palembang, perdagangan menjadi kegiatan yang utama bagi masyarakat.

Sesuai dengan letaknya, perekonomian Palembang sangat dipengaruhi oleh perdagangan dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Diketahui dari berbagai tulisan mengatakan bahwa sumber penghasilan Kesultanan yang lebih besar sesungguhnya berasal dari kegiatan perdagangan.

Kota Palembang berfungsi sebagai pusat perdagangan yang menampung arus barang dagang dari wilayah pedalaman, sekaligus menjadi tujuan akhir barang-barang yang diekspor maupun barang yang diimpor. Pertemuan perahu-perahu dagang dari wilayah hulu maupun hilir Palembang menciptakan tumbuhnya pusat-pusat perdagangan baru. Di setiap sungai maupun di pusat-pusat keramaian dapat di jumpai dermaga-dermaga perahu dagang. Terfokusnya pertemuan perahu dagang, baik dari kawasan hulu maupun hilir, menjadikan Sungai Musi sebagai pusat perdagangan yang utama dalam bentuk Pasar Terapung.⁶⁴ Pasar merupakan tempat berkumpulnya antara penjual dan pembeli dimana disana terjadinya transaksi jual beli, selain itu

⁶⁴ Melisa, *Ampera dan Perubahan Orientasi Ruang Perdagangan Kota Palembang 1920an-1970an*, hlm. 55-56, dalam: <https://jurnal.ugm.ac.id>. diakses pada 7 Februari 2019.

pasar menduduki tempat penting bagi para pelaku ekonomi perdagangan. Dalam ekonomi kesultanan, Kota Bandar seperti Palembang menjadi pusat jaringan pasar yang tertinggi.

Dikatakan bahwa sektor perdagangan merupakan sektor terpenting pada masa Kesultanan Palembang Darussalam. Perdagangan Kesultanan Palembang bukan hanya berlangsung dalam lingkup domestik, melainkan juga menjangkau pasar ekspor.⁶⁵ Woelders mengatakan dalam buku *Het Sultanaat Palembang*, bahwa pada masa kepemimpinan Sultan Mahmud Badaruddin I diketahui bahwa setiap musim segala macam bentuk perahu dagang masuk ke Palembang dan dari Bangka membawa timah sedangkan dari Belitung membawa besi, semua barang dagang tersebut memberikan keuntungan bagi Palembang.⁶⁶

Perdagangan pada masa kesultanan diadakan bukan hanya dari dalam wilayah kesultanan melainkan juga dari luar wilayah Palembang, seperti Pulau Jawa dan Riau, bahkan sampai keluar negeri seperti Siam dan Cina. Disamping itu pulau-pulau yang datang dengan menggunakan kapal atau perahu membawa dan mengambil barang-barang dagangan.

Barang-barang dagangan itu berupa macam-macam kain Linen, kain Cita Eropa dari yang kasar sampai yang halus. Juga barang-barang dari Cina seperti Sutera, benang emas, panci-panci besi, pecah-belah, obat-obatan, teh, manisan dan barang-barang lain. Pedagang kain linen terbesar adalah orang-orang Arab. Menyusul

⁶⁵ Nawiyanto dan Eko Crys Endrayadi, *Kesultanan Palembang Darussalam : Sejarah dan Warisan Budayanya*, hlm. 78.

⁶⁶ M.O. Woelders, *Het Sultanaat Palembang 1811-1825*, hlm. 81

orang Cina yang membeli barang-barang dari perahu. Orang-orang Palembang membeli dari orang-orang Arab dan Cina dan membawanya ke pedalaman untuk dijual disana. Orang-orang Palembang biasa membeli barang dengan kredit dan membayar dengan barang-barang pula.⁶⁷ Berbagai barang dagang yang datang ke Palembang, sehingga pada masa Sultan Mahmud Badaruddin I terdapat dua bentuk transaksi dalam perdagangan, yakni pertama menggunakan uang dan kedua dengan barter atau pertukaran barang dengan barang.

J.I. Van Sevenhoven mengatakan perdagangan yang terbesar pada masa Kesultanan Palembang dilakukan dengan pulau Jawa, Bangka, Cina, Riau, Singapura, Pulau Pinang, Malaka, Lingga, Siam, maupun dari pulau-pulau kecil sekitar yang datang menggunakan perahu. Barang dagang utama adalah berbagai macam kain Lina dari Jawa dan dari pantai sekitar, berbagai kain cita Eropa dan sebagainya. Selain itu berbagai barang pecah belah dari Cina, sutra kasar, benang emas, panci-panci besi, obat-obatan, teh, manisan, dan barang-barang Cina lainnya.⁶⁸ Bidang perdagangan menjadi penopang kemakmuran kesultanan dan tergambar jelas dalam buku J. Sevenhoven bahwa pada masa itu ramainya kegiatan perdagangan Palembang.

Di Palembang terbagi dua daerah yang biasa disebut *Iliran* dan *Uluan*. Masyarakat *Uluan* yang umumnya bermata pencarian sebagai petani. Oleh karena itu harga untuk barang yang akan diserahkan kembali kepada penduduk yang

⁶⁷ Ali Amin, "Sejarah Kesultanan Palembang Darussalam dan Beberapa Aspek Hukumnya", dalam K.H.O. Gadjahnata dan Sri Edi Swasono (ed.), *Masuk dan Berkembangnya Islam di Sumatera Selatan*, hlm. 99

⁶⁸ J.I. Van Sevenhoven, *Lukisan Tentang Ibukota Palembang*, (Yogyakarta: Ombak, 2015), hlm. 56

menyerakan komoditas dari uluan dinaikkan harganya sebesar seratus hingga dua ratus persen. Sebaliknya, produk dari uluan yang dijual kepada Sultan harganya diturunkan.⁶⁹ Dengan demikian, penduduk uluan yang membeli barang dari sultan dengan harga telah dinaikkan kemudian menerima uang dari hasil penjualan produk mereka dengan harga yang lebih rendah.

Berbeda dengan masyarakat *Uluang* yang umumnya bermata pencarian sebagai petani, penduduk kawasan *Iliran* merupakan kelompok masyarakat yang dilahirkan dengan bakat dagang. Mereka yang tinggal dikawasan dataran rendah ini memang rawan banjir akibat tekanan aliran sungai-sungai yang mengelilinginya dengan demikian, penduduk yang tinggal dan bermukim di daerah airan ini tidak pernah berhasil mengembangkan sistem pertanian secara lebih leluasa.⁷⁰

Diketahui bahwa dalam bidang ekonomi, Sultan Mahmud Badaruddin I telah menjalin jaringan perdagangan sampai ke negeri luar, bahkan sampai ke manca negara. Kesultanan Palembang Darussalam sudah memiliki dan mengeluarkan sendiri koin mata uang sebagai alat pembayaran yang sah, selain Dolar Spanyol yang resmi berlaku saat itu.

2. Pertanian

Selain perdagangan, pertanian juga menduduki tempat penting dalam rumah tangga ekonomi kesultanan di Nusantara. Penyerahan produksi pertanian dari

⁶⁹ Farida R. Wargadalem., *Kesultanan Palembang dalam Pusaran Konflik (1804-1825)*, hlm. 31

⁷⁰ Maryani Sujiyati, "Perubahan dan Kesenambungan Tata Ruang Kota Palembang, 1906-1965: Sebuah Tinjauan Morfologi Perkotaan", *Skripsi*. Palembang: Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah. 2014. hlm. 60.

pedesaan merupakan salah satu sumber penting ekonomi kesultanan. Penyerahan pendapatan itu diperoleh melalui sistem pajak penghasilan tanah yang diambil dalam bentuk barang dan penyerahan upeti dalam bentuk hasil bumi atau tenaga.⁷¹ Diketahui bahwa sumber pendapatan Sultan Mahmud Badaruddin I diperoleh dari berbagai sumber seperti dari hasil pertanian yang diproduksi oleh masyarakat yang tinggal di pedalaman yang kemudian dibawa ke kota untuk dijual kembali.

Pertanian berkembang dengan baik di berbagai wilayah Palembang berkat kondisi tanahnya yang subur. Tanah-tanah di sekitar ibukota Kesultanan dan pedalaman menghasilkan banyak buah dan sayur-mayur dengan kualitas yang sangat baik. Bukan hanya di wilayah sekitar ibukota, pedalaman Palembang juga dikatakan sebagai wilayah yang menghasilkan produk-produk yang penting bagi Belanda untuk menyuplai pasar di Eropa.

Masyarakat Uluan pada umumnya kehidupan perekonomiannya mereka didasarkan pertanian tradisional (ladang), menangkap ikan dan mengumpulkan hasil-hasil hutan seperti: damar, rotan, madu/lilin, margasatwa, gading dan lain-lain. Semua hasil yang didapat kemudian dibawa ke kota dengan melalui sungai menggunakan perahu, karena jalan darat pada waktu itu tidak ada.⁷²

Berbagai produk yang dihasilkan Palembang, sebagian dimanfaatkan untuk ekspor, antara lain rotan, getah, damar, damar wangi, kayu laka, lilin, gading gajah, tanduk kerbau, emas pasir, kopi, gula aren, gambir, pinang, kayu manis, nila, lada,

⁷¹ Djoko Suryo, "Ekonomi Masa Kesultanan," dalam Taufik Abdullah, (ed.), *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam Asia Tenggara*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Houve, 2002), hlm. 283.

⁷² Ma'moen Abdullah, (ed.), *Sejarah Daerah Sumatera Selatan*, hlm. 90

tembakau, rami, tebu, getah naga, sarang burung, katun mentah katun murni, kemenyan, tikar rotan, karet beras, emas kain, baju, berbagai kerajinan tangan, tembaga olahan, kuningan dan tembikar. Produk tambang selain timah adalah emas (banyak terdapat di Rawas, Pasumah), sulfur, besi.⁷³ Dari banyak produk yang dihasilkan di Palembang salah satu produk yang mendukung kegiatan pertanian yang menjadi andalan bagi Sultan Mahmud Badaruddin I yaitu produk pertanian khususnya lada yang banyak diminati oleh bangsa Eropa.

3. Pertambangan Timah

Kegiatan pertambangan timah putih di Indonesia telah dilakukan sejak ratusan tahun yang lalu. Penggunaan timah sudah dimulai sejak masa Sultan Abdurrahman Khalifatul Mukminin Saidul Iman yang digunakan sebagai bahan uang koin oleh Kesultanan Palembang.⁷⁴ Timah atau *timar* merupakan komoditas perdagangan penting yang banyak dikirim ke Cina. Tambang timah yang terletak di pulau Bangka dekat Palembang ditemukan pada 1710. Tambang ini digarap oleh koloni dari Cina di bawah arahan Sultan Palembang.⁷⁵ Timah sebagai komoditas perdagangan yang diunggulkan oleh Kesultanan Palembang serta bahan tambang yang paling banyak diperlukan dan dicari untuk berbagai kebutuhan memberikan keuntungan ekonomi yang banyak bagi Sultan.

⁷³ Farida R. Wargadalem, *Kesultanan Palembang dalam Pusaran Konflik (1804-1825)*. hlm. 29

⁷⁴ Sabtando Joko Suprpto, *Potensi, Prospek dan Pengusahaan Timah Putih di Indonesia*, dalam: <http://psdg.bgl.esdm.go.id>. diakses pada: Sabtu, 9 Februari 2019.

⁷⁵ William Marsden, *Sejarah Sumatra*, (Jakarta: Komunitas Bambu, 2013), hlm. 197.

Diketahui bahwa komoditi yang penting adalah hasil pertambangan timah. Sewaktu pemerintahan Sultan Mahmud Badaruddin I, parit-parit timah di Bangka diperluas dengan mendatangkan pekerja-pekerja dari Siam dan Koci, sedangkan cara penambangan mengikuti pola parit-parit timah di Johor.⁷⁶ Dengan memperluas tambang timah yang ada di Bangka dan mendatangkan para pekerja dari luar wilayah Palembang dapat membantu dan mengolah hasil tambang menjadi lebih mudah.

Timah memang merupakan komoditas yang sangat bernilai. Bahan ini sangat dibutuhkan Belanda untuk kegiatan industri di negeri Belanda dan negara-negara Eropa lainnya. Oleh sebab itu, Belanda selalu berusaha membujuk sultan Palembang agar memberikan hak monopoli perdagangan timah kepada mereka. Sejak 1722 VOC sudah membeli timah milik Kesultanan untuk dikirim ke Eropa dan ingin mendapatkan hak monopoli dari Kesultanan Palembang. Volume penjualan timah Kesultanan Palembang kepada VOC pada periode 1730-1740 mencapai rata-rata 20.000 *pikul* per tahun (1 *pikul*=62,5kg).⁷⁷ Timah dianggap sebagai komoditas yang sangat menguntungkan pada masa Sultan Mahmud Badaruddin I dan banyak diminati oleh orang-orang Barat. sehingga VOC menginginkan pasokan yang lebih besar melalui hak monopoli.

Produksi timah paling besar dihasilkan pada tahun 1751, yaitu sejumlah 16.884 *pikul*. Pada tahun 1755, sebuah komisi khusus diutus dari Batavia untuk

⁷⁶ Ali Amin, "Sejarah Kesultanan Palembang Darussalam dan Beberapa Aspek Hukumnya", dalam K.H.O. Gadjahnata dan Sri Edi Swasono (ed.). *Masuk dan Berkembangnya Islam di Sumatera Selatan*, hlm. 99

⁷⁷ Djohan Hanafiah, *Kuto Besak: Upaya Kesultanan Palembang Menegakkan Kemerdekaan*. (Jakarta: CV Haji Masagung, 1989), hlm.111

mengatur hal-ihwal VOC di Kesultanan Palembang dan kontrak-kontrak kerjasama yang telah dibuat. Laporan-laporan dari komisi itu memberikan informasi mengenai perkembangan usaha pertambangan di Bangka di sekitar pertengahan abad itu. Sebuah lampiran di laporan-laporan itu memberikan angka-angka produksi timah yang dikirimkan dari Palembang ke Batavia, di antara tahun 1733 sampai tahun 1754. Produksi timah itu perlahan-lahan meningkat—dari 1110 pikul (148.000 pon Inggris) menjadi lebih dari 16.000 pikul (2.133.333,33 pon Inggris).⁷⁸

Sultan Mahmud Badaruddin I memiliki kekuasaan untuk mengelola serta menguasai sektor kegiatan perdagangan, pertanian maupun pertambangan, selain itu pemerintah juga terlibat dalam pengelolaan sektor perdagangan serta perkebunan dan pertanian maupun pertambangan sehingga kesultanan memiliki sumber pendapatan. Melalui pajak, upeti, serta monopoli perdagangan kesultanan dapat menarik semua pendapatan di wilayah kekuasaannya.

Sebagai pusat kekuasaan dengan mengandalkan sungai, kesultanan menyadari pentingnya penguasaan atas jalur-jalur air. Hal ini dipandang vital untuk mendukung kegiatan perdagangan yang menjadi andalan SMB I, baik perdagangan produk pertanian khususnya lada dan hasil hutan maupun produk tambang terutama timah dari Pulau Bangka dan Belitung. Penguasaan atas jalur-jalur air memerlukan dukungan kapal-kapal dan perahu yang memadai dan handal.⁷⁹

⁷⁸.Frieda Amran Masa, *Awal Persebaran Pertambangan Timah di Banka*, dalam: www.beritapagi.co.id, diakses pada: 12 April 2019.

⁷⁹ Nawiyanto dan Eko Crys Endrayadi. *Kesultanan Palembang Darussalam : Sejarah dan Warisan Budayanya*, hlm. 87

Palembang mendapat banyak julukan atas keberhasilan dalam pembangunan politik, ekonomi, dan sosial. Bagaikan pusat perdagangan di Eropa yaitu Venesia yaitu, maka Palembang mendapat julukan *Het Indische Venetie*. Bahkan nama *Darussalam* diterjemahkan *de stad des vredes* yang berarti tempat yang tentram.⁸⁰

Perkembangan kota Palembang pada masa pemerintahan Sultan Mahmud Badaruddin I mengalami kemajuan dan juga modernisasi. Sultan Mahmud Badaruddin I adalah tokoh utama dalam pembangunan Palembang, baik di bidang ekonomi, politik maupun tatanan sosial. Diketahui bahwa penghasilan Kesultanan Palembang berasal dari berbagai sumber. Selain itu Kesultanan Palembang juga terkenal sebagai penghasil berbagai kerajinan.

Diketahui bahwa penghasilan kesultanan Palembang masa Sultan Mahmud Badaruddin I berasal dari berbagai sumber. Besarnya potensi ekonomi yang dimiliki Kesultanan Palembang merupakan faktor penting terbentuknya Palembang menjadi kota yang maju disertai juga dengan jumlah penduduk yang banyak .

Namun, sumber penghasilan kesultanan yang lebih besar sesungguhnya berasal dari kegiatan perdagangan. Perdagangan Kesultanan Palembang bukan hanya berlangsung dalam lingkup domestik, melainkan juga menjangkau pasar ekspor. Sektor perdagangan menjadi penopang kemakmuran kesultanan dan masyarakat pada masa itu.

⁸⁰ Ravico, "Konflik Elit Politik di Kesultanan Palembang Darussalam tahun 1803-1821", *Tesis*, (Palembang: Universitas Islam Negeri Raden Fatah, 2013), hlm 45.

BAB IV

DAMPAK KEBIJAKAN EKONOMI SULTAN MAHMUD BADARUDDIN I TERHADAP KEMAJUAN KESULTANAN PALEMBANG

Setiap pemerintah yang berkuasa akan selalu membuat kebijakan, karena pemerintah yang mengendalikan semua kebijakan yang dilaksanakan. Kebijakan ekonomi merupakan salah satu kebijakan yang dibuat bertujuan untuk mencapai kemakmuran serta kesejahteraan masyarakat. Dengan kemajuan ekonomi dapat membangun suatu peradaban yang maju.

Antara kebijakan ekonomi dan pembangunan ekonomi mempunyai kaitan yang sangat erat. Tujuan utama dari kebijakan ekonomi adalah alokasi, distribusi dan stabilisasi dan pada mulanya tujuan pembangunan ekonomi yang terutama adalah pertumbuhan ekonomi. Secara umum dapat dikatakan bahwa pembangunan ekonomi adalah kebijakan ekonomi yang dilaksanakan dalam keadaan khusus.⁸¹ Untuk memajukan dan mengatur perekonomian, pemerintah menggunakan berbagai kebijakan. Kebijakan merupakan konsep yang menjadikan dasar rencana dalam melaksanakan suatu pekerjaan dan memimpin rakyatnya.

Seperti halnya pada masa Kesultanan Palembang bahwa Sultan memegang peranan penting dalam urusan pemerintahan. Sultan sebagai pengendali ekonomi harus membuat peraturan dan kebijakan yang harus dilaksanakan serta mempertimbangkannya dalam setiap mengambil keputusan. Jika dilihat pada masa

⁸¹ Soetrisno, *Dasar-Dasar kebijaksanaan Ekonomi dan kebijaksanaan Fiskal*, (Yogyakarta: BPFE, 1983), hlm. 106.

Sultan Mahmud Badaruddin I yang memegang kekuasaan penuh terhadap pemerintahan sekaligus sebagai pengendali perekonomian, membuat berbagai kebijakan untuk mencapai kemakmuran serta tujuan pembangunan yang lebih baik.

A. Kebijakan Ekonomi Sultan Mahmud Badaruddin I

Sistem perdagangan pada masa kesultanan Palembang Darussalam adalah adanya monopoli yang dipegang oleh pihak Kesultanan. Sistem monopoli perdagangan yang berlaku pada masa Kesultanan menjadi salah satu ciri perekonomian kesultanan yang otonom yakni sultan memiliki hak dan kekuasaan dalam menentukan keputusan.

Sebagai pemegang monopoli perdagangan dengan rakyat, Sultan menjalankan sistem perdagangan yang dikenal dengan istilah *Tibang (Tiban)* dan *Tukong (Tukon)*. *Tibang* adalah pertukaran wajib barang-barang produk dari pedalaman dengan barang-barang impor. *Tukong* adalah penukaran barang dari pedalaman dengan uang. Barang-barang yang digunakan untuk *tibang* adalah baju Jawa, kain Bengala putih, kapak/parang besi dan garam.⁸²

Sultan Mahmud Badaruddin I mengelola sumber daya alam yang terdapat di daerah kekuasaannya. Penguasa yang berkedudukan di Palembang mempunyai daerah kekuasaan yang kaya akan sumberdaya alam, seperti Bangka dan Belitung yang kaya dengan hasil tambang yakni timah, serta daerah pedalaman yang kaya dengan hasil pertanian dan perkebunannya. Selain berdagang ekonomi Kesultanan

⁸² Farida, *Perekonomian Kesultanan Palembang*, hlm. 4-5.

juga didapat dari hasil pajak dan bea cukai. Hasil dari perdagangan dan pajak memberikan kekayaan kepada Kesultanan Palembang yang banyak memberi pengaruh terhadap kehidupan manusia.

B. Bentuk-bentuk Kebijakan Ekonomi SMB I

1. Kebijakan Perdagangan

Kepemimpinan Sultan Mahmud Badaruddin I memberikan kontribusi kebijakan bagi perkembangan ekonomi Palembang. Letak Palembang yang strategis menjadikan Palembang sebagai Bandar Perdagangan. Adanya hubungan dengan luar negeri menjadikan Palembang mengalami perkembangan perdagangan baik impor maupun ekspor.

Para pedagang yang melakukan kegiatan-kegiatan perdagangan dikerajaan membawa perkembangan ekonomi di Palembang. Sehingga Sultan Mahmud Badaruddin I berhasil membawa kerajaannya mencapai kemajuan di bidang ekonomi dan politik.

Sistem perdagangan pada masa Kesultanan Palembang adalah adanya monopoli yang terpusat di tangan pihak kesultanan. Dalam kaitan dengan wilayah pedalaman, misalnya hubungan perdagangan istana kesultanan dengan kepala-kepala daerah atau rakyat di pedalaman diwujudkan dalam pola kewajiban *tiban-tukon*.⁸³ Para pedagang bangsawan dan Sultan berperan penting dalam ekonomi perdagangan di Palembang

⁸³ Nawiyanto dan Eko Crys Endrayadi. *Kesultanan Palembang Darussalam : Sejarah dan Warisan Budayanya*. hlm. 79

terutama monopoli bahan perdagangan pokok selain itu dalam hal modal, kepemilikan kapal dagang, urusan perdagangan, pengelolaan Bandar serta pasar juga dipegang oleh Sultan.

2. Kontrak Dagang dengan VOC

Perkembangan kekuasaan imperialis dan kolonialis dari Eropa membuat perekonomian SMB I ikut dipengaruhi oleh hubungan dagangnya dengan kompeni.⁸⁴ Dalam melakukan perdagangan, Sultan Mahmud Badaruddin I melakukan perjanjian dengan VOC untuk menjual hasil tambang timah yang ada di Bangka dan Belitung dengan harga yang telah disepakati dalam kontrak perjanjian, yaitu Contract Palembang 10 September 1755.

“Bahwa.....perjanjian yang telah diperbuat-buat sekarang ini dibaharui pula segala perkara itu perjanjian yang zaman purbakala setelah bermufakat antara kedua pihak kampeni Belanda dengan raja yang dahulu-dahulu sekali duduk diatas tahta karajaan Palimbang dan yang demikian itu adalah sekarang ini baharui pula dengan barangperkara lain-lain. Lagi bermufakat dengan keputusan yang sempurna khair shaleh antara paduka Sri Sulthon Ratu memerintah atas tahta karajaan nagari Palimbang serta sekalian orang besar-besar dengan tuan gubernur Jenderal Jacob Musel. Jenderal dalam negeri Belanda yang memerintahkan segala rakyat-rakyatnya. Maka adalah Gubernur Jenderal dan segala (vaan raad) India

⁸⁴ Ali Amin, “Sejarah Kesultanan Palembang Darussalam dan Beberapa Aspek Hukumnya”, dalam K.H.O. Gadjahnata, *Masuk dan Berkembangnya Islam di Sumatera Selatan* hlm. 100

*menguatkan komisaris Johanes Andreas Pada melakukan atas segala perihal ihwal yang khoir shaleh. Itu maka hendaklah bermufakat dengan keputusan yang sempurna dimateraikan dengan wasiqot lil mawaddah supaya baqi adanya.*⁸⁵

Pemberian hak monopoli kepada VOC merupakan strategi Sultan yang dilakukan untuk melonggarkan tekanan dari VOC. VOC memaksakan kontrak monopoli perdagangan timah dan lada kepada Sultan Mahmud Badaruddin I. Dengan pemberlakuan hak monopoli ini, para pedagang selain dari Belanda tidak boleh ikut terlibat dalam perdagangan tersebut.

Sultan Palembang memperlihatkan cara-cara penggunaan taktik tersebut dalam rangka memenuhi politik monopoli perdagangan VOC di satu pihak, dan pada pihak lain adalah cara untuk memperoleh keuntungan dengan negosiasi-negosiasi yang menjurus pada perbaikan harga komoditas yang dimonopoli VOC.⁸⁶ Diketahui bahwa, Sultan Mahmud Badaruddin I merupakan seorang yang pandai berdiplomasi sehingga pada masanya tidak terjadi konflik antara pihak Kesultanan dengan Kompeni. Dalam kontrak tersebut Sultan Palembang memperlihatkan kebijakan ekonominya yang bekerjasama dalam menghadapi VOC.

Sultan Mahmud Badaruddin I menandatangani kontrak kerjasama dengan komisioner Belanda. Dalam kontrak tersebut Sultan berjanji akan menjual lada dan timah hasil produksi dari Palembang dan Bangka kepada VOC dengan harga tertentu yang telah ditetapkan dalam kontrak tersebut. Akan tetapi diluar dari kontrak dagang

⁸⁵ ANRI, Jakarta, *Contract Palembang 10 September 1755*, dalam Arsip VOC, No. 41.8

⁸⁶ Endang Rochmiatun, *Perubahan Ekonomi dan Perkembangan Peradaban Islam*, dalam Jurnal Lektur Keagamaan, Vol.13, No. 2, 2015, hlm 377

antara pihak Kesultanan dengan VOC, Sultan Mahmud Badaruddin I juga melakukan perdagangan dengan Inggris untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar dari pada keuntungan yang didapat dengan VOC.

3. Kebijakan Pertanian

Pada abad ke XVII perdagangan rempah-rempah semakin ramai akibat kedatangan bangsa-bangsa Eropa yang saling bersaing (Inggris, Portugis, Belanda), sedangkan Lampung dan Bengkulu yang merupakan daerah penghasil lada telah dikuasai oleh Banten. Palembang yang sebelumnya mendapat lada dari daerah-daerah itu kehilangan sumber, lalu berusaha untuk memproduksi sendiri. Itulah sebabnya Sultan Palembang membujuk daerah-daerah Uluu untuk bekerjasama masalah lada, karena Sultan memegang peranan penting sebagai penyalur dan daerah Uluu sebagai produsen.⁸⁷

Hasil-hasil dari kesultanan Palembang dan yang di ekspor adalah rotan ikat, damar, kapur barus, kemenyan, kayu lako, lilin, gading dan pasir emas. Barang-barang ini dikumpulkan dari hutan-hutan dari tepi-tepi sungai. Selain itu ada yang sengaja di tanam seperti lada, kopi, tebu, gambir, pinang, tembakau dan nila. Hasil-hasil lainnya adalah ikan kering dan ikan asin, barang pecah belah, tikar rotan dan jerami, karung, barang-barang dari kuningan, sutera dijalin dengan benang emas

⁸⁷ P. De Roo De Faille, *Dari Zaman Kesultanan Palembang (terj.)*, (Jakarta: Bhratara, 1971), hlm. 87

(*songket*) dan lain-lain dari benang kapas tenunan sendiri.⁸⁸ Melihat dari banyaknya produk pertanian dan perkebunan yang dihasilkan oleh masyarakat di wilayah Kesultanan Palembang yang sebagian hasil tersebut akan dimanfaatkan untuk ekspor. Produk-produk tersebut dibawa oleh penduduk Uluu ke ibu kota dengan menggunakan perahu atau rakit dan kemudian produk tersebut dijual kepada pedagang yang ada di ibu kota Palembang.

Sultan Mahmud Badaruddin I juga melakukan pembangunan dalam bidang pertanian dengan pengairan (terusan) yang sekaligus juga menjadi sarana pertahanan pada masa itu. Menurut Farida R. Wargadalem, Sultan Mahmud Badaruddin I menyuruh daerah Uluu yaitu daerah Rawas untuk menanam lada.⁸⁹

Pada masa Kesultanan lada merupakan salah satu komoditi yang menguntungkan. Pada tahun 1773 Kesultanan Palembang menjual lada sebanyak 6.721 *pikul* kepada pihak VOC. Volume penjualan lada turun menjadi 4.141 *pikul* pada tahun 1774, namun meningkat kembali menjadi 6.105 *pikul* pada tahun 1775.⁹⁰

Keadaan turun naiknya penjualan timah dan lada dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor iklim sudah tentu ikut mempengaruhi volume lada yang dapat dipanen. Faktor lain yang lebih penting adalah tingkat keseriusan pihak kesultanan untuk memenuhi kontraknya terhadap VOC. Hal ini ikut ditentukan oleh tingkat harga lada di “pasar gelap” atau di luar VOC. Perlu diketahui bukan hanya VOC yang tertarik

⁸⁸ Ali Amin, “Sejarah Kesultanan Palembang Darussalam dan Beberapa Aspek Hukumnya”, dalam K.H.O. Gadjahnata, *Masuk dan Berkembangnya Islam di Sumatera Selatan*, hlm. 99

⁸⁹ Wawancara pribadi dengan Farida R. Wargadalem, Palembang, 25 April 2019.

⁹⁰ Djohan. Hanafiah, *Kuto Besak: Upaya Kesultanan Palembang Menegakkan Kemerdekaan*. Jakarta: CV Haji Masagung, 1989. hlm. 112

perdagangan lada, melainkan juga ada pedagang-pedagang asing lainnya yang berminat mengumpulkan lada untuk dijual di pasar Eropa maupun Asia.⁹¹ Turun naiknya produk timah dan lada yang akan dijual kepada pihak VOC mengalami berbagai kendala. Selain faktor iklim juga dipengaruhi oleh penjualan lada dan timah kepada para pedagang di luar VOC yang dipandang lebih menguntungkan pihak Kesultanan. Selain itu harga yang diperoleh jauh lebih tinggi dibandingkan dengan harga monopoli lada dan timah yang ditetapkan VOC kepada Kesultanan.

Perkara yang kesepuluh

..... Bahwa hendaklah ditentukan oleh Paduka Sri Sultan atau segala timah yang ada di Pulau Bangka atau di Belitung yaitu jangan sekali-kali serahkan kepada tangan lain bangsa melainkan diserahkan kepada Kompeni asal tiada kurang rial//⁹²

Perkara yang kedua

..... Bahwa oleh orang-orang Kompeni atau Residenti Kompeni yang tiba ditulis hatinya kepada Kompeni boleh dikira-kirakan Residenti Kompeni amat menyuruh pula orang-orang Paduka Seri Sultan Ratu yang membuat kerugian kepada Kompeni, daripada mencuri lada, timah itulah sebab Kompeni kurang mendapat beroleh lada dengan timah sampai beberapa tahun // yang Kepala Kompeni tiada berisi dengan patutnya dari karena itulah Kompeni terkejut mendengar butir lada dan timah dicuri sini dibawa ke negeri Cina.⁹³

⁹¹ *Ibid.*, hlm 114-115

⁹² ANRI, Jakarta, *Contract Palembang 10 September 1755*, dalam Arsip VOC, No. 41.8

⁹³ ANRI, Jakarta, *Contract Palembang 10 September 1755*, dalam Arsip VOC, No. 41.8

Berdasarkan kontrak dagang yang dilakukan pihak VOC dengan Kesultanan bahwa VOC melarang penjualan timah diluar kesepakatan. Diluar kontrak Sultan melakukan perdagangan gelap dengan pihak asing selain VOC. Itulah sebabnya VOC mendapatkan sedikit atas perdagangan timah dan lada. Diketahui juga peran Inggris sangat besar dalam melakukan perdagangan gelap selain itu Inggris selalu memberi peluang untuk melakukan perdagangan gelap di luar kontrak dengan VOC. Karena keuntungan yang didapat dari hasil perdagangan gelap lebih besar dari pada menjual kepada pihak VOC.

Menurut penulis perdagangan gelap yang dilakukan oleh pihak kesultanan bukanlah suatu tindakan kejahatan, karena tambang timah dan perkebunan lada merupakan kekuasaan dari Kesultanan Palembang dimana Sultan memiliki hal atas itu semua. Disamping itu Sultan Mahmud Badaruddin I juga ingin mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari pada menjual kepada pihak VOC. Karena harga yang ditawarkan oleh Inggris dan cina jauh lebih besar dari pada harga yang dibeli oleh VOC. Dari hasil perdagangan gelap ini pihak Kesultanan banyak memperoleh keuntungan.

4. Kebijakan Pertambangan

Salah satu komoditi yang penting pada masa Kesultanan Palembang adalah hasil pertambangan timah. Ditemukannya timah di Bangka mengundang kedatangan orang-orang asing, terutama orang Cina, yang tidak hanya bekerja di tambang-tambang itu, tetapi juga memperkenalkan pertanian dan perdagangan kepada penduduk setempat. Hutan-hutan mulai dibuka dan dibersihkan untuk membuat

permukiman yang permanen.⁹⁴ Pada masa pemerintahan Sultan Mahmud Badaruddin I, dibuatlah parit-parit timah di Bangka serta diperluas dengan mendatangkan pekerja-pekerja dari Siam dan Koci, selain itu cara penambangan timah mengikuti pola parit-parit timah di Johor.⁹⁵

Sultan bekerjasama dengan orang-orang Cina yang memiliki pengetahuan dalam hal penambangan timah. Selain orang Cina sebagai pekerja, diantara mereka juga diberikan jabatan untuk mengurus timah di Bangka. Bukan saja penduduk pribumi yang melakukan penambangan timah di Bangka tetapi penduduk non pribumi juga berperan dalam penambangan timah di Bangka yang memberikan keuntungan terhadap Sultan.

Pada awal abad XVIII permintaan timah di pasar internasional mengalami peningkatan. Hal ini sejalan dengan meningkatnya perdagangan baik di kawasan Asia Tenggara maupun antara Eropa dan Asia (Asia Selatan, Asia Tenggara dan Asia Timur). Itulah sebabnya tidak mengherankan jika usaha-usaha yang dilakukan oleh VOC ke daerah-daerah baru juga semakin meningkat.⁹⁶

Sebuah lampiran di laporan-laporan memberikan angka-angka produksi timah yang dikirimkan dari Palembang ke Batavia, di antara tahun 1733 sampai tahun 1754. Produksi timah itu perlahan-lahan meningkat dari 1110 pikul (148.000 pon Inggris) menjadi lebih dari 16.000 pikul (2.133.333,33 pon Inggris). Produksi paling besar

⁹⁴ Frieda Amran, *Dr Thomas Horsfield dan Pulau Banka*, dalam: www.Beritapagi.Ac.Id, Diakses Pada: Jumat 12 April 2019

⁹⁵ K.H.O. Gadjahnata Dan Sri Edi Swasono (Ed.). *Masuk dan Berkembangnya Islam Di Sumatera Selatan*, hlm. 99

⁹⁶ Endang Rochmiatun, *Perubahan Ekonomi dan Perkembangan Peradaban Islam*, dalam *Jurnal Lektur Keagamaan*, Vol.13, No. 2, 2015, hlm 372

dihasilkan pada tahun 1751, yaitu sejumlah 16.884 pikul.⁹⁷ Dari data diatas diketahui bahwa setiap tahun jumlah produksi timah di Bangka mengalami peningkatan yang mengharuskan Sultan mengirim timah ke Batavia sesuai dengan perjanjian.

Perkara yang kedelapan.....Syahdan ditentukan oleh paduka Seri Sulthon Ratu dari pada kirim membawa lada dengan timah dari sini ke Batavia kepada waktu lima hari bulan Mei yakni bulan Rajab yaitu sudah ada di laut⁹⁸

Masa Sultan Mahmud Badaruddin I produksi timah mengalami peningkatan. Peningkatan komoditas ini dipengaruhi oleh kerjasama serta negosiasi antara Sultan dengan VOC dengan dikirimkannya timah dari Palembang ke Batavia.

Pada rentang waktu antara tahun 1760-1780 merupakan masa yang tenang bagi Bangka dan masyarakatnya mengalami periode yang makmur dan tenteram. Pada masa ini Palembang memiliki sumber keuangan dari perdagangan timah, lada dan hasil hutan. Tambang timah terdapat di pulau Bangka yang dikelola oleh orang-orang Melayu dan Cina. Sultan memberikan subsidi, upah dan biaya hidup kepada penambang. Akan tetapi timah yang dihasilkan lalu dibeli oleh Sultan dengan harga yang telah ditentukan.⁹⁹

Semakin meningkatnya jumlah produksi timah maka akan semakin besar juga keuntungan yang didapat oleh Sultan Mahmud Badaruddin I. Dari hasil perdagangan yang diperoleh oleh Sultan memberikan kemakmuran pada masyarakat saat itu. Para

⁹⁷ Frieda Amran, *Dr Thomas Horsfield dan Pulau Banka*, dalam: www.beritapagi.ac.id, Diakses Pada: Jumat 12 April 2019

⁹⁸ ANRI, Jakarta, *Contract Palembang 10 September 1755*, dalam Arsip VOC, No. 41.8

⁹⁹ Dedi Irwanto M. Santun, dkk., *Iliran dan Uluan: Dinamika dan Dikotomis Sejarah Kultural Palembang*, (Yogyakarta,: Eja Publiser, 2010), hlm. 52

pekerja mendapatkan upah yang besar serta hasil yang mereka kumpulkan dibeli oleh Sultan yang kemudian akan dijual kembali kepada orang asing.

Sebagai pengeksport timah terbesar, Kesultanan Palembang mampu untuk menjadi pengendali harga timah dipasar dunia. Keuntungan yang besar dalam menjalankan usaha perdagangan, pertambangan dan hasil bumi lainnya akan memberikan dampak yang baik terhadap perekonomian serta pembangunan kota Palembang.



Gambar: Pencucian timah hasil pendulangan, Banka, tanpa tahun (Tropenmuseum, Amsterdam)¹⁰⁰

5. Mata Uang

Sejak agama Islam menjadi agama resmi Kesultanan Palembang, maka perlengkapan penting dari Kesultanan Palembang seperti lambang, cap stempel, uang koin dan lainnya memiliki simbol Islami dengan menggunakan aksara Arab Melayu.

¹⁰⁰ Frieda Amran, “Masa Awal Persebaran Pertambangan Timah di Banka”, artikel diakses pada 12 April 2019, dari: <http://beritapagi.co.id/2017/10/07/masa-awal-persebaran-pertambangan-timah-di-banka.html>

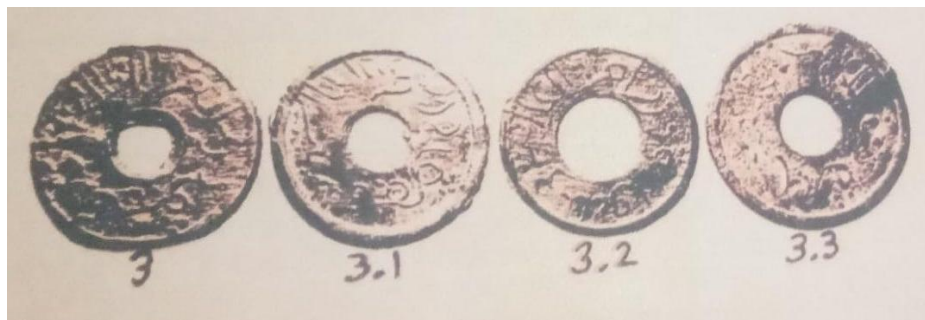
Kesultanan Palembang Darussalam sudah memiliki dan mengeluarkan sendiri koin mata uang dalam berbagai ukuran dan corak sebagai alat pembayaran yang sah. Mata uang Kesultanan Palembang disebut *Pitis* yang telah diproduksi sejak abad ke 16 M. Selain itu Masa Kesultanan Palembang juga berlaku mata uang Dolar Spanyol sebagai alat tukar dan jual beli.

Seorang pejabat VOC Hemmij, ketika itu bahkan pernah menghitung kekayaan Sultan yang berkuasa pada masa itu sekitar 60 juta Real Spanyol. William Marsden yang mengelilingi Sumatera dan pernah singgah di Palembang juga mengatakan bahwa negeri ini pada masa itu telah melimpah kekayaannya dan memiliki mata uang sendiri yang terbuat dari timah. Mata uang tersebut dikenal dengan sebutan "Pitis".¹⁰¹



Gambar : Cap stempel masa Sultan Mahmud Badaruddin I

¹⁰¹ Doedy, "Mata Uang Kesultanan Palembang Darussalam", artikel diakses pada 12 April 2019, dari: <http://beritapagi.co.id/2017/10/02/mata-uang-kesultanan-palembang-darussalam.html>



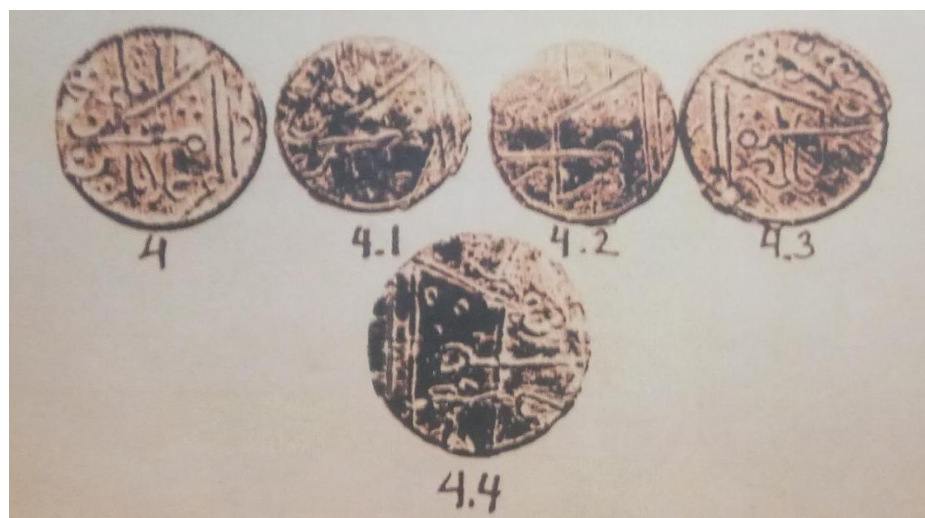
*Koin Masa Sultan Mahmud Badaruddin I*¹⁰²

Keterangan Gambar:

3. Mahmud Badaruddin I, tertanggal 1162/1749 AH, Sultan di negeri Palembang
Islam 1162 H. “seribu kali lipat 184, 22mm, R5.

3.1. 21mm, R10

3.3. 22mm, versi kasar yang aneh dari jenis ini, R10



*Gambar : Koin Kesultanan Palembang*¹⁰³

¹⁰² Frank S. Robinson, *Palembang Coins*, New York: Verity Press Internasional, 2015

¹⁰³ Frank S. Robinson, *Palembang Coins*, New York: Verity Press Internasional, 2015

Keterangan gambar:

4. Pembaharuan melalui beberapa sumber mengatakan tahun 1163/1750 “di negeri

Palembang” seribu kali lipat, 200, 21 mm, R1

4.1 Lebih kecil dan sedikit kasar, 19-20 mm, R7

4.2 A Versi kasar 20 mm, R 8

4.3 As # 4 tapi mengelilingi (cermin-gambar), 21 mm, R4

4.4 As # 4.2 but mengelilingi, 20 mm, R10

6. Kebijakan Membayar Pajak, Upeti, Bea Cukai

Pendapatan penting yang diperoleh Kesultanan antara lain dari penarikan bea cukai, penarikan impor dan dari ekspor, transit kapal atau perahu dagang asing, pasar di Bandar, serta pajak perdagangan baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk barang. Penarikan bea cukai di Bandar atau pelabuhan perdagangan diserahkan kepada seorang pejabat yaitu syahbandar atau pejabat kerajaan yang ditunjuk.¹⁰⁴ Pejabat kerajaan ini bertugas membantu urusan Sultan dalam hal mengatur perdagangan, mereka juga yang bertugas melancarkan urusan perdagangan serta menerima pajak dari para pedagang.

Para raja dan bangsawan, baik secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam pengelolaan sektor perdagangan serta pertanian, yaitu sebagai kelompok raja pedagang dan bangsawan pedagang sehingga kerajaan memiliki

¹⁰⁴ Djoko Suryo, “Ekonomi Masa Kesultanan,” dalam Taufik Abdullah, (ed.), *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam Asia Tenggara*, hlm. 284

sumber pendapatan untuk menghidupi rumah tangga istana kerajaannya.¹⁰⁵ Oleh sebab itu, dengan melakukan penarikan bea cukai, pajak, upeti, serta monopoli barang dagang kesultanan dapat menarik semua pendapatan dan keuntungan di wilayah kekuasaannya. Masa Sultan Mahmud Badaruddin I sudah adanya sarana dan prasarana dalam perdagangan lokal maupun di luar Palembang.

Selain itu dalam menjalankan perdagangan dengan rakyat Sultan Mahmud Badaruddin I memberlakukan sistem *Tibang* (Tiban) dan *Tukong* (Tukon). Oleh karena itu, harga untuk barang-barang yang akan diserahkan kembali kepada penduduk yang menyerahkan komoditas dari *Uluan* dinaikkan harganya sebesar seratus hingga dua ratus persen. Sebaliknya, produk dari *Uluan* yang dijual kepada Sultan harganya diturunkan. Dengan demikian, *penduduk Uluan* membeli barang dari Sultan dengan harga telah dinaikkan, dan menerima uang dari hasil penjualan produk mereka dengan harga yang lebih rendah. Kedua sistem perdagangan tersebut menyebabkan Sultan mampu menumpuk kekayaan.¹⁰⁶

Memberlakukan sistem *tiban* dan *tukon* dalam wilayah kekuasaan Kesultanan Palembang juga berfungsi sebagai pajak. Masyarakat yang menjalankan sistem ini akan mendapatkan hasil dari penjualan dengan harga yang lebih rendah. Walaupun demikian masyarakat tetap mematuhi peraturan seperti ini, karena Sultan lah yang mengatur semua urusan produksi dan perdagangan yang ada di wilayah Palembang.

¹⁰⁵ Djoko Suryo, "Ekonomi Masa Kesultanan," dalam Taufik Abdullah, (ed.), *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam Asia Tenggara*, (jilid 5:Asia Tenggara). hlm. 283

¹⁰⁶ Farida R. Wargadalem, *Kesultanan Palembang dalam Pusaran Konflik (1804-1825)*, hlm. 31.

Barang yang dibeli dari masyarakat kemudian akan dijual kembali oleh Sultan kepada pedagang asing yang datang, itulah sebabnya Sultan menjual dengan harga yang lebih tinggi untuk memperoleh keuntungan.

Selain itu, mengenai penghasilan kesultanan bahwa di Palembang setiap kapal yang masuk dikenakan bea pelabuhan, yang besarnya menurut banyaknya anak kapal. Untuk Bangka ditetapkan dalam peraturan mengenai kewajiban-kewajiban dari rakyat Bangka, tentang kewajiban mengeluarkan sepotong timah tiban (cukai).¹⁰⁷

Kapal-kapal pedagang yang datang dari luar Palembang untuk menjual dan membeli barang dagang di Palembang akan dikenakan pajak pelabuhan. Hasil dari pajak tersebut kemudian dimasukkan kedalam kas kesultanan, melalui pajak dan upeti inilah yang menjadi sumber pendapatan bagi Kesultanan Palembang.

C. Dampak Kebijakan Ekonomi SMB I Terhadap Kemajuan Pembangunan Kesultanan Palembang

Kemajuan merupakan suatu upaya untuk mengubah keadaan menjadi lebih baik. Dengan kemajuan akan terjadinya suatu perubahan yang diinginkan kearah yang lebih maju. Perekonomian yang baik dalam Kesultanan Palembang mampu menciptakan kemakmuran. Dampak dari kebijakan ekonomi berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi, kemajuan serta pembangunan di Kesultanan Palembang.

¹⁰⁷ Ali Amin, "Sejarah Kesultanan Palembang Darussalam dan Beberapa Aspek Hukumnya", dalam K.H.O. Gadjahnata, *Masuk dan Berkembangnya Islam di Sumatera Selatan*, hlm. 97

1. Pembangunan Kota Palembang

Pada masa pemerintahan Sultan Mahmud Badaruddin I Kota Palembang dibangun menjadi sebuah kota modern. Upaya ini dilakukan dengan melakukan penataan kampung-kampung dan jalan-jalan. Sultan Mahmud Badaruddin I juga meletakkan pembangunan bangunan-bangunan monumental Palembang, termasuk diantaranya Bangunan Kuto Lamo, Makam Kawah Tengkreup serta bangunan Masjid Sultan Mahmud Badaruddin Jayo Wikramo (Masjid Agung Palembang), Sultan Mahmud Badaruddin I juga memprakarsai pembangunan Benteng Kuto Besak pada tahun 1737.¹⁰⁸

Perkembangan kota Palembang pada masa Sultan Mahmud badaruddin I mengalami kemajuan dan modernisasi. Hal ini dapat dilihat dari hasil-hasil peninggalan Sultan yang masih ada di Palembang maupun di Bangka. Sultan seorang pemimpin yang tegas dan disegani rakyatnya serta mampu membawa kemajuan dalam wilayah kekuasaannya. Bahkan pengaruh Kesultanan Palembang Darussalam sudah mencapai wilayah-wilayah perbatasan.

Menurut Djohan Hanafiah, Sultan Mahmud Badaruddin I adalah Sultan yang cerdas, rakyatnya dibawa kearah pembangunan fisik secara modern. Gedung-gedung batu monumental dibangunnya, termasuk pertambangan timah, pertanian dengan pengairan (terusan) yang sekaligus juga menjadi sarana pertahanan”¹⁰⁹ Dampak dari

¹⁰⁸ Nanang S. Soetadji, “Kesultanan Palembang”, dalam Djohan Hanafiah (ed.), *Perang Palembang Melawan VOC*. (Palembang: Pemerintah Kotamadya Palembang, 1996.), hlm: 10-11

¹⁰⁹ Djohan Hanafiah, *Perang Palembang 1819-1821*. Palembang: Parawisata Jasa Utama, 1986. hlm. 2

pembangunan membawa kemajuan bagi kegiatan perekonomian, politik, sosial dan budaya yang ada di Palembang. Dibawah ini merupakan hasil dari pembangunan pada masa Sultan Mahmud Badaruddin I:

a. Kawah Tengchurep

Sultan Mahmud Badaruddin I memerintahkan untuk melakukan pembangunan makam. Dimana bangunan ini merupakan bangunan batu pertama yang dibuatnya, sebelum memerintahkan pembangunan Kuto Tengchurek dan Masjid Sultan. Makam ini dibuat pada sekitar tahun 1728, bangunan keraton ini dibangun atas perintah Sultan Mahmud Badaruddin I yang diresmikan pada 17 September 1737.¹¹⁰

Nama Tengchurep dipakai untuk menyebut kompleks makam ini karena pada atap bangunan yang menaungi makam Sultan Mahmud Badaruddin I terbuat dari beton dan berbentuk kawah yang tertelungkup. Kawah adalah sejenis kuali besar yang digunakan untuk memasak.¹¹¹ Penamaan makam ini diambil dari bentuk kubah yang mirip seperti kawah atau kuali yang terbalik, oleh karena itu makam ini dikenal sebagai Kawah Tengchurep. Di dalam kompleks Makam Kawah Tengchurep terdapat beberapa makam Sultan Palembang beserta para zuriatnya,

Komplek makam ini dikelilingi pagar tembok bata dengan gapura gerbang, masuknya terletak disisi selatan, menghadap ke arah Sungai Musi. Di dalam lingkungan kompleks terdapat empat buah bangunan cungkup, masing-masing adalah bangunan Kawah Tengchurep tempat jasad Sultan Mahmud Badaruddin I

¹¹⁰ Djohan Hanafiah. *Dari Kerajaan Sriwijaya sampai Kesultanan Palembang*, hlm. 33

¹¹¹ Dinas Budpar. "Kota Wisata Sungai: Masjid Ki Marogan", *Buku Saku*. Palembang: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palembang, hlm. 21

dimakamkan, bangunan cungkup pangeran Ratu Kamuk yang wafat pada tahun 1755, bangunan cungkup Susuhunan Ahmad Najamuddin yang wafat tahun 1776.¹¹²

b. Keraton Kuto Batu

Bangunan ini merupakan bangunan keraton yang dikelilingi oleh tembok dari batu dengan pintu gerbang kokoh yang menghadap ke Sungai Musi. Bangunan keraton ini dibangun atas perintah Sultan Mahmud Badaruddin I yang peresmian pemakaiannya dilakukan pada tanggal 17 September 1737 setelah lebih dari 10 tahun memegang tampuk pemerintahan Palembang. Letaknya di tanah keraton agak kearah Sungai Tengkuruk dan Sungai Musi.¹¹³

Mengenai gambaran Kuto Batu sendiri ada dua orang Eropa yang menuliskannya, yaitu William Marsden dan J.C. M Radermacher. Marsden dalam kitabnya yang terkenal *History of Sumatra* mendeskripsikan: “dalem atau istana dikelilingi oleh dinding tembok yang tinggi, tak seorang Eropa pun tahu tentang bagian dalamnya, dan tampaknya dalam keadaan besar, mengagumkan dan banyak sekali ornamen dibagian luarnya.

Tidak jauh dari dinding Kuto, dibagian yang lebih rendah terdapat battery yang ditempatkan pada sebuah bangunan kokoh beratap berbentuk segi empat mengawasi sungai. Lebih kebawah lagi dari dinding ini, juga terdapat meriam-meriam yang terpasang, ditembakkan pada saat-saat khusus. Diantara kedua jarak battery terlihat medan atau lapangan, pada bagian ujung tampak balairung atau

¹¹² Djohan Hanafiah. *Dari Kerajaan Sriwijaya sampai Kesultanan Palembang*, hlm. 33

¹¹³ *Ibid.*, hlm. 34

ruangan Sultan bertatap muka dengan rakyatnya. Gedung ini bentuknya biasa saja, kadangkala dipakai sebagai gudang, tetapi dihiasi dengan senjata-senjata diseluruh dindingnya.”¹¹⁴

c. Masjid Sultan Mahmud Badaruddin Jayo Wikramo

Masjid Sultan Mahmud Badaruddin Jayo Wikramo merupakan salah satu warisan sejarah peradaban Islam yang ada di Palembang. Masjid Sultan Mahmud Badaruddin Jayo Wikramo yang mulanya dikenal dengan nama Masjid Sultan kemudian diganti nama menjadi Masjid Agung, merupakan bangunan yang dibuat atas perintah dari Sultan Mahmud Badaruddin I.

Masjid yang berada di sudut timur laut tanah keraton, di dekat pertemuan Sungai Kapuran dan Sungai Tengkuruk, terdapat sebuah bangunan masjid yang berdiri megah. Bangunan masjid ini merupakan kelengkapan dari sebuah kota yang bernuansa Islam.¹¹⁵ Peresmian peletakan batu pertama Masjid ini dilakukan pada tanggal 1 Jumadil Akhir 1151 Hijriah dan peresmian pemakaiannya dilakukan pada tanggal 28 Jumadil Awal 1151 H. (26 Mei 1748M).¹¹⁶

¹¹⁴ Djohan Hanafiah, *dari Kerajaan Sriwijaya sampai Kesultanan Palembang*, hlm. 35

¹¹⁵ Djohan Hanafiah, *dari Kerajaan Sriwijaya sampai Kesultanan Palembang*, hlm. 36

¹¹⁶ Yayasan Masjid Agung Palembang, *Sekayang Pandang Masjid Sultan Mahmud Badaruddin*, Palembang, 2019. hlm. 4



Masjid Agung Tahun 1800-an

Masjid ini pada zamannya adalah masjid yang terindah dan terbesar di Nusantara dengan arsitektur khasnya berupa atap limas. Pelaksanaan pembangunan masjid ini berada di bawah pengawasan arsitek Eropa. Bahan-bahan meterialnya, seperti batu marmer dan kaca, diimport dari Eropa khas dengan sentuhan arsitektur gaya Cina dan teknologi Eropa.¹¹⁷

Proses pembangunan Masjid Sultan Mahmud Badaruddin Jayo Wikramo yang dibangun pada masa SMB I menggunakan bahan-bahan yang mendatangkan dari luar Palembang, hal ini memerlukan ekonomi yang banyak, selain itu terbukti dari SMB I juga mampu mendatangkan arsitek dari Eropa. Sejak berdirinya bangunan Masjid ini banyak mengalami perkembangan serta perubahan bentuk yang lebih diperluas, mengingat banyaknya masyarakat Palembang yang datang.

Setelah beberapa kali terjadi pergantian nama Masjid Agung, maka pada 2 Februari tahun 2019 Masjid Agung berganti nama menjadi Masjid Sultan Mahmud

¹¹⁷ Djohan Hanafiah, *dari Kerajaan Sriwijaya sampai Kesultanan Palembang*, hlm. 36

Badaruddin Jayo Wikramo. Jika diperhatikan letak masjid Sultan sangatlah strategis, terletak di tengah-tengah pusat kota, dekat Benteng Kuto Besak dan tidak jauh dari sungai Musi serta dekat dengan pasar 16 Ilir.

Masjid ini adalah sebuah masjid paling besar di Palembang, karena itu perkembangan Islam tidak lepas dari aktivitas ekonomi itu sendiri. Aktivitas ekonomi memberikan dampak dalam bidang keagamaan dengan terciptanya kemakmuran. Kemajuan peradaban Islam di Palembang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas ekonomi yang membawa banyak perubahan. Berbagai kebijakan yang dibuat oleh Sultan memperlihatkan bahwa Sultan juga sangat peduli terhadap kesejahteraan rakyatnya.

BAB V PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap temuan peneliti tentang Dampak Kebijakan Ekonomi Sultan Mahmud Badaruddin I Terhadap Kemajuan Pembangunan Kesultanan Palembang (1137-1171 H / 1724-1757 M), maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan ekonomi pada masa pemerintahan Sultan Mahmud Badaruddin I melakukan monopoli perdagangan, kontrak dagang dengan VOC, pencetakan Mata Uang, kebijakan membayar pajak, upeti, dan bea cukai, semua kebijakan ini memberikan keuntungan bagi Kesultanan Palembang. Selain itu SMB I melakukan pengembangan tambang timah di Bangka dan menata sistem perdagangan yang memberikan keuntungan bagi Kesultanan Palembang.

Kebijakan-kebijakan ekonomi Sultan Mahmud Badaruddin I membawa dampak kemajuan dalam bidang pembangunan dan ekonomi. Sehingga dapat berdampak pada kemajuan peradaban Islam di Palembang. Sultan Mahmud Badaruddin I banyak melakukan pembangunan kota, diantaranya Makam Lemabang atau dikenal juga dengan nama Kawah Tekurep tahun 1728 M, Keraton Kuto Batu (Kuto Lamo) tahun 1737 M, Masjid Sultan Mahmud Badaruddin Jayo Wikramo (Masjid Agung) tahun 1738 M.

B. SARAN

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan kepada masyarakat untuk dapat mengetahui dan memahami sejarah lokal Sumatera Selatan. Kesultanan Palembang merupakan peninggalan sejarah yang harus selalu hidup dan tidak boleh hilang dalam ingatan kita.

Tulisan-tulisan mengenai Kesultanan Palembang di Palembang relatif masih terbatas. Untuk itu, harapan penulis kepada peneliti selanjutnya dapat melengkapi karya sejarah Kesultanan Palembang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Arsip

ANRI: Katalog Palembang. No. 41.8 *Contract Palembang 10 September 1755*.

B. Buku

A. Daliman. *Metode Penelitian Sejarah*. Yogyakarta: Ombak. 2012.

Ali Amin. "Sejarah Kesultanan Palembang Darussalam dan Beberapa Aspek Hukumnya". Dalam K.H.O. Gadjahnata dan Sri Edi Swasono (ed.), *Masuk dan Berkembangnya Islam di Sumatera Selatan*. Jakarta: UI-Press. 1986

Dedi Irwanto M. Santun, dkk., *Irian dan Uluan: Dinamika dan Dikotomis Sejarah Kultural Palembang*. Yogyakarta,: Eja Publisier. 2010.

Dinas Budpar. "Kota Wisata Sungai: Masjid Ki Marogan", Buku Saku. Palembang: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palembang.

Djohan Hanafiah. *Kuto Besak: Upaya Kesultanan Palembang Menegakkan Kemerdekaan*. Jakarta: CV Haji Masagung,1989.

Djohan Hanafiah. *Dari Kerajaan Sriwijaya sampai Kesultanan Palembang*.

Djohan Hanafiah. *Kesultanan Palembang Darussalam dalam Perspektif Sumatera Selatan*, dalam: "Perang Palembang Melawan VOC". (ed.). Palembang: Karyasari. 1996.

Djohan Hanafiah. *Melayu-Jawa: Citra Budaya dan Sejarah Palembang*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1995.

Endang Rochmiatun. *Ulama dan Perkembangan Lektur Islam di Palembang*. Palembang: Nor Fikri. 2014.

Farida R. Wargadalem. *Kesultanan Palembang dalam Pusaran Konflik (1804-1825)*. Jakarta: Gramedia. 2017.

Indri Safitri. "Sejarah Perekonomian Kota Palembang: Masa Pemerintahan Kolonial Belanda, 1825-1942 M". *Skripsi*. Palembang: Universitas Islam Negeri Raden Fatah. 2017.

- J.I. Van Sevenhoven, *Lukisan Tentang Ibu Kota Palembang*. Jakarta: Bhatara. 1971.
- James A. Caporaso dan David P. Levine. *Teori-Teori Ekonomi Politik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2015.
- Djoko Suryo, “Ekonomi Masa Kesultanan,” dalam Taufik Abdullah, (ed.), *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam Asia Tenggara*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Houve, 2002.
- K.H.O. Gadjahnata dan Sri Edi Swasono (ed.). *Masuk dan Berkembangnya Islam di Sumatera Selatan*. Jakarta: UI-Press. 1986.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia: Edisi ke-3. Jakarta: Balai Pustaka. 2005.
- Louis Gottschalk. *Mengerti Sejarah*. (Terj.) Jakarta: UI Pers. 2015.
- M. Dien Madjid dan Johan Wahyudhi. *Ilmu Sejarah Sebuah Pengantar*. Jakarta: Prenada Media Group. 2014.
- M.O. Woelders. *Het Sultanaat Palembang 1811-1825*. Gravenhage. 1975
- Ma'moen Abdullah. *Sejarah Daerah Sumatera Selatan*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sumsel. 1991.
- Maryani Sujiyati. “Perubahan dan Kesenambungan Tata Ruang Kota Palembang, 1906-1965: Sebuah Tinjauan Morfologi Perkotaan”. *Skripsi*. Palembang: Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah. 2014.
- Melisa. *Ampera dan Perubahan Orientasi Ruang Perdagangan Kota Palembang 1920an-1970an*. dalam: <https://jurnal.ugm.ac.id>. diakses pada 7 Februari 2019.
- Nawiyanto dan Eko Crys Endrayadi. *Kesultanan Palembang Darussalam : Sejarah dan Warisan Budayanya*. Jember: Universiti Press. 2016.
- Nor Huda. *Sejarah Sosial Intelektual Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2015.
- P. De Roo De Faille. *Dari Zaman Kesultanan Palembang* (terj.). Djakarta: Bhratara. 1971.
- Ravico, “Konflik Elit Politik di Kesultanan Palembang Darussalam tahun 1803-1821”, *Tesis*, Palembang: Universitas Islam Negeri Raden Fatah. 2013.

- Retno Purwanti. "Mata Pencaharian Masyarakat Palembang pada Abad XIX-XX di Daerah Hilir", dalam *Peradaban Masa Lalu Sumatera Selatan*. Palembang: Balai Arkeologi Sumatera Selatan. 2016.
- Salman Ali. "Sejarah Kesultanan Palembang", dalam buku K.H.O. Gadjahnata dan Sri Edi Swasono, (ed.). *Masuk dan Berkembangnya Islam di Sumatera Selatan*. Jakarta: UI-Press. 1986.
- Nanang S. Soetadji. "Kesultanan Palembang". dalam Djohan Hanafiah (ed.). *Perang Palembang Melawan VOC*. (Palembang: Pemerintah Kotamadya Palembang. 1996.
- Suhartono W. Pranoto. *Teori dan Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2010.
- Supriyanto. *Pelayaran dan Perdagangan di Pelabuhan Palembang 1824-1864*. Yogyakarta: Ombak. 2013.
- Taufik Abdullah. (ed.). *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam Asia Tenggara*. Jakarta: PT. Ichtiar BAru Van Houve. 2002.
- Temenggung Citra Mirwan. *Besemah Keluarga Besar Rumpun Melayu*. Pagaralam: Yayasan Dempo Lestari. 2015.
- Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Adab dan Humaniora*. Palembang: Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Fatah. 2016.
- Uniek Yuniar Vili Hastuti. *Kajian Kondisi Sosial*. Palembang: FKIP UMP. 2015.
- William Marsden. *Sejarah Sumatra*. Jakarta: Komunitas Bambu. 2013.
- Yayasan Masjid Agung Palembang. "*Selayang Pandang Masjid Sultan Mahmud Badaruddin*". Palembang: 2019.

C. Internet

Doedy, Mata Uang Kesultanan Palembang Darussalam, dalam: www.beritapagi.co.id, diakses pada: 12 April 2019.

Endang Rochmiatun, Perubahan Ekonomi dan Perkembangan Peradaban Islam di Palembang Abad XVII-XIX: Telaah atas Naskah-naskah Kontrak Sultan Palembang, dalam: Jurnal Lektur Keagamaan, 2015, diakses melalui: <http://jurnallekturkeagamaan.kemenag.go.id> , diakses pada: 3 Mei 2018.

Farida. *Perekonomian Kesultanan Palembang*. dalam : Journal.unj.ac.id. diakses pada: 3 Mei 2018.

Frieda Amran Masa. Awal Persebaran Pertambangan Timah di Banka, dalam: beritapagi.co.id. diakses pada: 12 April 2019.

Frieda Amran. Dr Thomas Horsfield dan Pulau Banka, dalam: www.beritapagi.ac.id. Diakses pada: Jumat 12 April 2019

Sabtanto Joko Suprpto, *Potensi, Prospek dan Pengusahaan Timah Putih di Indonesia*, dalam: <http://psdg.bgl.esdm.go.id>. diakses pada: Sabtu, 9 Februari 2019.

[Http://kesultananpalembangdarussalam.blogspot.com](http://kesultananpalembangdarussalam.blogspot.com)

Lampiran 2: Contract Palembang 10 September 1755. Perkara yang kedua

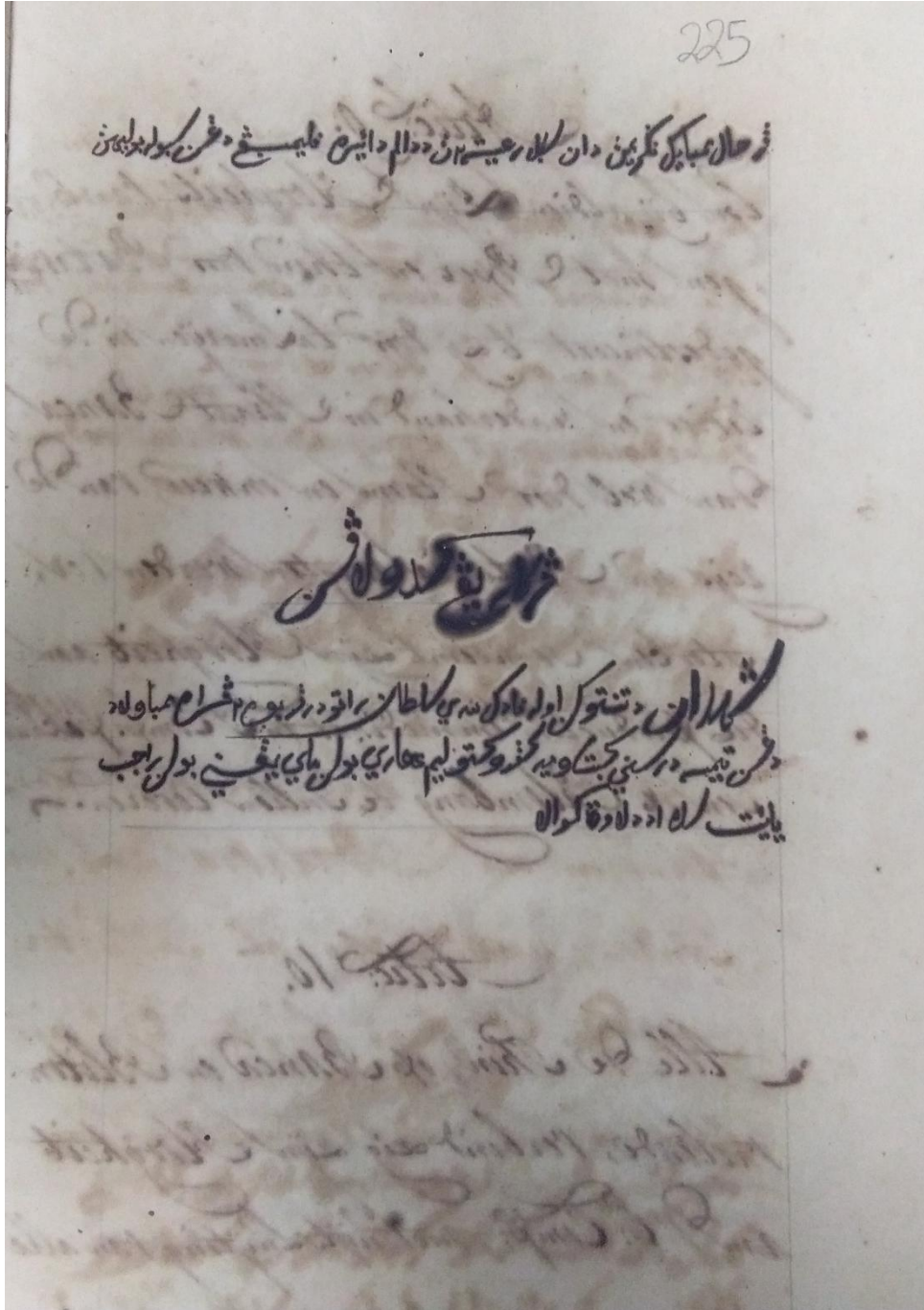
213

باو کلاون دواون مجیرایت ادا در کسان استار کردو فی حق اگر نکلیخ
دو دواون فرمایا ادا در کسان استار کردو فی حق اگر نکلیخ
دواون اتو در کسان استار کردو فی حق اگر نکلیخ
بیتله دیساروی دواون اتو در کسان استار کردو فی حق اگر نکلیخ

قراریت کردو

باو ادا در کسان استار کردو فی حق اگر نکلیخ
دواون اتو در کسان استار کردو فی حق اگر نکلیخ
بیتله دیساروی دواون اتو در کسان استار کردو فی حق اگر نکلیخ
دواون اتو در کسان استار کردو فی حق اگر نکلیخ
بیتله دیساروی دواون اتو در کسان استار کردو فی حق اگر نکلیخ

Lampiran 3: Contract Palembang 10 September 1755. Perkara yang kedelapan



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Pribadi

Nama : Leni Mastuti
Tempat/Tgl. Lahir : Talang Aur, 28 November 1996
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status : Lajang
Anak ke : 3 dari 4 bersaudara
Alamat : Desa Talang Aur RT. 09 Dusun V Kec. Indralaya Kab. Ogan
Ilir Sumatera Selatan
Pekerjaan : Mahasiswa
No. Hp : 081369308679/089531911771
Email : lenymastuty@gmail.com

B. Identitas Orang Tua:

Ayah : Ahmad Syukri
Pekerjaan : Petani
Ibu : Nuraini
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Talang Aur RT. 09 Dusun V Kec. Indralaya Kab. Ogan Ilir
Sumatera Selatan

C. Riwayat Pendidikan

1. TPA Nurul Iman Talang Aur, tamat tahun 2008
2. SD Negeri 02 Talang Aur, tamat tahun 2009
3. SMPN 02 Indralaya, tamat tahun 2012
4. MAN Sakatiga, tamat tahun 2015